

A/SEP/1991/123

PERANAN BANK BUKOPIN SEBAGAI LEMBAGA PENYALUR KREDIT BAGI PENGEMBANGAN KOPERASI

Studi Kasus KUD Sejahtera Kademangan, Kecamatan Mande,
Kabupaten Cianjur, Jawa Barat

Oleh

S. ASIH ISNIYANTI

A 23.0982



JURUSAN ILMU - ILMU SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
1991



RINGKASAN

S. ASIH ISNIYANTI. Peranan Bank BUKOPIN Sebagai Lembaga Penyalur Kredit Bagi Pengembangan Koperasi. Studi Kasus KUD Sejahtera Kademangan, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat (Dibawah bimbingan Halimah W. Kadarsan).

Tujuan dari Praktek Lapang ini adalah untuk mempelajari peranan Bank BUKOPIN sebagai lembaga penyalur kredit bagi koperasi. Untuk melihat penerapan dari peranan dan pembinaan serta bimbingan Bank BUKOPIN terhadap nasabah dan anggotanya maka KUD Sejahtera Kademangan, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dipilih sebagai studi kasus. KUD ini merupakan nasabah debitur dari Bank BUKOPIN.

Sulitnya koperasi-koperasi yang ada di Indonesia untuk mendapatkan kredit dari bank menghambat usaha untuk memajukan dan mengembangkan koperasi. Hal tersebut terjadi karena adanya anggapan bahwa koperasi-koperasi yang ada di Indonesia belum dapat menjalankan usahanya secara komersial sehingga bank-bank berusaha untuk menghindarkan adanya resiko tersebut. Keadaan ini mendorong induk-induk koperasi yang ada untuk membentuk suatu bank koperasi yang memprioritaskan pelayanannya kepada koperasi.

Bank BUKOPIN adalah bank koperasi yang didirikan pada tanggal 10 Juli 1970 di Jakarta yang mengacu pada dua undang-undang yaitu UU No.12/1967 tentang Pokok-Pokok Per-

koperasi dan UU No.14/1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Sejak berdiri hingga kini Bank BUKOPIN mengalami kemajuan yang pesat. Hal ini tercermin didalam jumlah anggota yang semakin meningkat, usaha yang semakin berkembang, dan semakin meningkatnya peringkat Bank BUKOPIN diantara bank-bank swasta yang ada berdasarkan jumlah assetnya.

Didalam menjalankan peranannya sebagai lembaga penyalur kredit bagi koperasi, Bank BUKOPIN banyak memberikan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang mempermudah koperasi dalam memenuhi prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh pihak bank pada umumnya masih sulit untuk dipenuhi oleh koperasi-koperasi.

Selain berbagai kemudahan terhadap prosedur-prosedur, Bank BUKOPIN juga terus berusaha untuk membina koperasi-koperasi dari segi managemennya. Disamping itu usaha Bank BUKOPIN untuk berkomunikasi dengan nasabahnya terus dilakukan dengan tujuan agar penggunaan kredit oleh koperasi dapat digunakan sebaik-baiknya untuk memajukan usaha.

Sebelum tahun 1986 masih sedikit kredit yang disalurkan ke koperasi. Oleh karena itu maka pemerintah menugaskan Bank BUKOPIN untuk mulai merangkul koperasi-koperasi. Walaupun persentase kredit kepada koperasi masih lebih kecil dari persentase kredit ke non koperasi, namun sejak

tahun 1986 kredit Bank BUKOPIN ke koperasi meningkat. Berdasarkan pengolahan Tabel 3. kredit yang disalurkan ke koperasi sebesar 35 persen sedangkan ke non koperasi sebesar 65 persen. Salah satu koperasi pertanian yang menerima bantuan kredit dari Bank BUKOPIN adalah KUD Sejahtera Kademangan yang digunakan sebagai kasus.

Alasan penetapan KUD Sejahtera Kademangan sebagai studi kasus walaupun KUD ini hanya mempunyai laporan keuangan selama dua tahun adalah Bank BUKOPIN menganggap KUD mempunyai prospek usaha yang cerah serta sesuai dengan latar belakang penulis yaitu sosial ekonomi pertanian.

Adanya berbagai kebijaksanaan dari Bank BUKOPIN, KUD ini tidak menemui kesulitan untuk memenuhi prosedur untuk mendapatkan kredit dari Bank BUKOPIN. KUD Sejahtera Kademangan mulai mendapat bantuan kredit dari Bank BUKOPIN sejak tahun 1988.

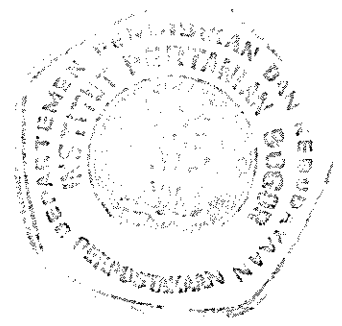
Dari hasil analisa likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas berdasarkan laporan neraca dan laporan rugi laba, selama dua tahun terakhir (1989-1990) menunjukkan keuangan KUD Sejahtera Kademangan cukup baik. Adapun laporan keuangan sebelum menjadi debitur Bank BUKOPIN tidak diperoleh, sebab KUD ini mengalami kevakuman usaha pada periode 1973-1988. Tingkat likuiditas KUD pada tahun 1990 (2.41) mengalami penurunan, karena penambahan hutang lancar lebih besar dari penambahan aktiva lancar. Namun



secara rata-rata rasio lancar (current ratio) KUD Sejahtera Kademangan sebesar 3.46 cukup baik.

Setelah terjadi kevakuman tingkat solvabilitas dari KUD ini selama dua tahun membaik dengan nilai yang sama. Nilai yang sama ini terjadi karena persentase kenaikan total aktiva tahun 1989-1990 sama dengan persentase kenaikan total hutang tahun 1989-1990. Nilai 1.02 yang dicapai berarti setiap 1 rupiah total hutang dijamin oleh 1,02 total aktiva.

Return On Net Worth KUD sejahtera Kademangan pada tahun 1989 bernilai 0.00. Hal ini terjadi karena pada tahun tersebut KUD baru mulai kembali usahanya, sehingga belum dapat menghasilkan laba bersih. Namun tahun berikutnya nilai yang dicapai cukup baik (0,66) yang berarti dengan adanya bantuan kredit lebih banyak kegiatan usaha dilaksanakan sehingga laba bersih meningkat.



Hal Cipta: Penerbitan, Unsur, dan lain-lain
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya ini tanpa izin penerbitan dan pencetakan.
2. Diperoleh dengan izin dari penerbitan dan pencetakan.
3. Diperoleh dengan izin dari penerbitan dan pencetakan.
4. Diperoleh dengan izin dari penerbitan dan pencetakan.
5. Diperoleh dengan izin dari penerbitan dan pencetakan.
6. Diperoleh dengan izin dari penerbitan dan pencetakan.
7. Diperoleh dengan izin dari penerbitan dan pencetakan.
8. Diperoleh dengan izin dari penerbitan dan pencetakan.
9. Diperoleh dengan izin dari penerbitan dan pencetakan.
10. Diperoleh dengan izin dari penerbitan dan pencetakan.

PERANAN BANK BUKOPIN SEBAGAI LEMBAGA PENYALUR
BAGI PENGEMBANGAN KOPERASI

Studi Kasus KUD Sejahtera Kademangan, Kecamatan Mande
Kabupaten Cianjur, Jawa Barat

Oleh :

S. Asih Isniyanti
A. 23 0982

Laporan Praktek Lapang
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Pertanian
pada

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
JURUSAN ILMU-ILMU SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

1991



Judul Praktek Lapang : Peranan Bank BUKOPIN Sebagai Lembaga Penyalur Kredit Bagi Pengembangan Koperasi (Studi Kasus KUD Sejahtera Kademangan, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat)

Nama Mahasiswa : S. Asih Isniyanti
Nomor Pokok : A 23. 0982
Program Studi : Agribisnis

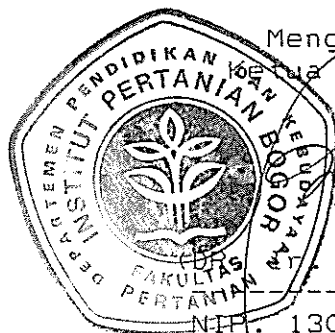
Menyetujui
Dosen Pembimbing

[Handwritten signature of Dra. H.W. Kadarsan]

(Dra. H.W. Kadarsan, M. Aec)

NIP. 130 442 182

Mengetahui
Ketua Jurusan



(Bunasor)

NIP. 130 345 012

Tanggal Lulus : 13 Desember 1991

Halaman ini merupakan bagian dari dokumen yang digunakan untuk keperluan akademik dan administratif. Hal ini adalah dokumen yang bersifat rahasia dan tidak boleh disebarluaskan kepada pihak lain. Apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian, mohon segera melaporkan kepada pihak yang berwenang. Dokumen ini adalah milik IPB University dan tidak boleh diperjualbelikan atau dipinjamkan kepada pihak lain. Dokumen ini adalah dokumen yang bersifat rahasia dan tidak boleh disebarluaskan kepada pihak lain. Apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian, mohon segera melaporkan kepada pihak yang berwenang. Dokumen ini adalah milik IPB University dan tidak boleh diperjualbelikan atau dipinjamkan kepada pihak lain.

PERNYATAAN

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTEK
LAPANG INI BENAR-BENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI YANG BELUM
PERNAH DIAJUKAN SEBAGAI KARYA ILMIAH PADA SUATU PERGURUAN
TINGGI ATAU LEMBAGA MANAPUN

Bogor, Desember 1991



S. ASIH ISNIYANTI

A. 23 0982

Halaman 1 dari 1
1. Diingat sebagai bagian dari sejarah saya dan IPB sebagai institusi yang memiliki komitmen dan tanggung jawab yang tinggi terhadap masyarakat.
2. Persepsi yang saya miliki tentang IPB sebagai institusi yang memiliki komitmen dan tanggung jawab yang tinggi terhadap masyarakat.
3. Persepsi yang saya miliki tentang IPB sebagai institusi yang memiliki komitmen dan tanggung jawab yang tinggi terhadap masyarakat.
4. Persepsi yang saya miliki tentang IPB sebagai institusi yang memiliki komitmen dan tanggung jawab yang tinggi terhadap masyarakat.
5. Persepsi yang saya miliki tentang IPB sebagai institusi yang memiliki komitmen dan tanggung jawab yang tinggi terhadap masyarakat.
6. Persepsi yang saya miliki tentang IPB sebagai institusi yang memiliki komitmen dan tanggung jawab yang tinggi terhadap masyarakat.
7. Persepsi yang saya miliki tentang IPB sebagai institusi yang memiliki komitmen dan tanggung jawab yang tinggi terhadap masyarakat.
8. Persepsi yang saya miliki tentang IPB sebagai institusi yang memiliki komitmen dan tanggung jawab yang tinggi terhadap masyarakat.
9. Persepsi yang saya miliki tentang IPB sebagai institusi yang memiliki komitmen dan tanggung jawab yang tinggi terhadap masyarakat.
10. Persepsi yang saya miliki tentang IPB sebagai institusi yang memiliki komitmen dan tanggung jawab yang tinggi terhadap masyarakat.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 19 Nopember 1968 sebagai anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis merupakan putri dari Bapak Moch. Faizal Rochlan dan Ibu bernama Poppy Kurlia.

Penulis lulus Sekolah Dasar Trisula Salemba, Jakarta pada tahun 1979. Pada Tahun 1983 penulis lulus Sekolah Menengah Pertama Negeri 76 Jakarta dan pada tahun 1986 penulis lulus Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Jakarta.

Pada tahun 1986 penulis diterima sebagai mahasiswa Institut Pertanian Bogor melalui jalur PMDK (Penelusuran Minat dan Kemampuan), tahun 1988 memilih Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian dengan minat utama program studi Agribisnis.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna sesuai dengan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki. Untuk itu kritik dan saran selalu penulis harapkan, demi kesempurnaan tulisan ini. Penulis senantiasa berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi yang memerlukan.

Bogor, Desember 1991

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
II. KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS	7
2.1. Arti, Tujuan dan Fungsi Kredit	7
2.2. Prosedur Umum Perkreditan	11
2.2.1. Tahap Pengajuan Permohonan kredit	12
2.2.2. Tahap Analisa Kredit	12
2.2.3. Tahap Pemutusan Kredit	15
2.2.4. Tahap Realisasi Kredit	16
2.2.5. Tahap Pengawasan Kredit	16
2.2.6. Tahap Penyelesaian Kredit	17
2.3. Kredit Sebagai Modal Koperasi	17
2.4. Analisa Finansial Koperasi	18
2.4.1. Analisa Likuiditas	18
2.4.2. Analisa Solvabilitas	20
2.4.3. Analisa Profitabilitas	21
III. METODOLOGI	23
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian	23
3.2. Pengumpulan Data	23
3.3. Pengolahan dan Analisa Data	24
3.3.1. Analisa Likuiditas	24
3.3.2. Analisa Solvabilitas	25
3.3.3. Analisa Profitabilitas	25
IV. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN BANK BUKOPIN	27
4.1. Sejarah Bank BUKOPIN	27
4.1.1. Perkembangan Bank BUKOPIN Sebagai Bank Koperasi	27
4.1.2. Keanggotaan Bank BUKOPIN	29
4.1.3. Struktur Organisasi dan Managemen Tata Kerja	33
4.1.3.1. Struktur Organisasi	33
4.1.3.2. Managemen Tata Kerja	34
4.2. Kedudukan Bank BUKOPIN Dalam Sistem Perbankan	47
4.3. Peranan dan Tugas Bank BUKOPIN	48
4.4. Bank BUKOPIN Sebagai Penyalur Kredit Bagi Koperasi	51
4.4.1. Persyaratan dan Prosedur Bank BUKOPIN	55

Halaman ini adalah bagian dari dokumen yang dihasilkan oleh sistem manajemen informasi dan sistem pendukung keputusan. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi website kami di www.ipb.ac.id.
 IPB University
 Institut Pertanian Bogor

4.4.2. Pembinaan Bank BUKOPIN Terhadap Koperasi Nasabah	57
V. GAMBARAN UMUM KUD SEJAHTERA KADEMANGAN	60
5.1. Sejarah KUD Sejahtera Kademangan	61
5.2. Bentuk Organisasi dan Managemen KUD Sejahtera Kademangan	62
5.2.1. Rapat Anggota	63
5.2.2. Pengurus	64
5.2.3. Badan Pemeriksa	66
5.3. Hubungan Antara KUD Sejahtera Kademangan dengan Bank BUKOPIN	67
5.4. Perkembangan Bidang Usaha Koperasi	70
5.5. Analisa Finansial KUD Sejahtera Kademangan	71
5.5.1. Analisa Likuiditas	72
5.5.2. Analisa Solvabilitas	74
5.5.3. Analisa Profitabilitas	76
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	78
6.1. Kesimpulan	78
6.2. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	84

Has Cera...
 1. Di...
 4. Pe...
 5. Pe...
 6. Di...

panan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela, sehingga sulit bagi koperasi untuk mengembangkan usahanya.

Didalam usaha untuk mengembangkan koperasi di Indonesia, salah satu faktor yang sangat penting adalah sektor permodalan. Mengingat bahwa permodalan koperasi masih sangat lemah maka perlu diusahakan adanya lembaga keuangan yang dapat membantu koperasi.

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan diharapkan dapat mengatasi kesulitan didalam permodalan koperasi. Oleh karena itu sejak permulaan tahun 1970, tepatnya 21 April 1970 diadakan rapat pembentukan Bank Umum Koperasi, yang kemudian pada tanggal 10 Juli 1970 didirikanlah Bank Umum Koperasi Indonesia (BUKOPIN) di Jakarta.

Bank BUKOPIN sebagai satu-satunya bank koperasi di Indonesia diharapkan dapat menjalankan fungsinya dalam memajukan dan mengembangkan koperasi yang ada di Indonesia. Dalam pencapaian tujuan tersebut, maka Bank BUKOPIN menyalurkan sebagian dananya kepada koperasi dalam bentuk kredit.

Pemberian kredit oleh Bank BUKOPIN merupakan sumber modal yang berasal dari luar yang timbul karena kurangnya modal yang berasal dari dalam koperasi tersebut. Sesuai dengan teori yang telah ada, dengan semakin majunya suatu perusahaan maka semakin sukar pula untuk mempertahankan perusahaan tersebut dijalankan hanya dengan modal

sendiri, maka kredit dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan usaha.¹⁾ Untuk menunjang usaha tersebut maka Bank BUKOPIN berusaha untuk memberikan fasilitas kredit dengan cara yang mudah dan menarik. Hal ini bertujuan agar setiap bidang usaha khususnya koperasi dapat memperoleh kesempatan untuk mengembangkan usahanya.

Penyaluran sebagian dana Bank BUKOPIN dalam bentuk kredit bagi gerakan koperasi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Hal ini terlihat didalam enam tahun terakhir, dimana terjadi peningkatan dalam penyaluran kredit kepada koperasi. Pada tahun 1986 pinjaman Bank BUKOPIN kepada koperasi sebesar Rp. 56.800 juta mengalami peningkatan hingga tahun 1991 sebesar Rp. 245.946 juta. (Tabel 3.)

Sebagai suatu organisasi ekonomi yang berwatak sosial dan beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan (UU No.12/1967), koperasi dianggap sebagai organisasi ekonomi yang cocok dengan peri kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu maka pertumbuhan bidang usaha koperasi digiatkan di Indonesia dengan mengadakan beberapa perbaikan baik dalam sistem ma-

1) Kadarsan, H.W. 1985. Keuangan dan Pembiayaan Perusahaan Pertanian. Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian, IPB. Hal. 20-21.

nagemen maupun permodalan, sehingga di masa datang diharapkan koperasi dapat berkembang menjadi suatu bidang usaha yang menguntungkan.

Adanya peningkatan dalam kredit Bank BUKOPIN kepada koperasi, menunjang tercapainya tujuan menjadikan koperasi suatu pelaku ekonomi yang ikut berperan dalam mencapai masyarakat yang sejahtera. Disamping itu timbul perkembangan baru didalam usaha Bank BUKOPIN dengan mulai merangkul koperasi yang bergerak di sektor pertanian. Hal ini merupakan suatu langkah baru dari Bank BUKOPIN, sehingga diharapkan koperasi-koperasi disektor pertanian dapat ikut merasakan manfaat kredit bagi pengembangan usahanya.

Berdasarkan latar belakang sosial ekonomi pertanian maka untuk melihat sampai sejauh mana pengaruh dari peranan Bank BUKOPIN disektor pertanian maka KUD Sejahtera Kademangan digunakan sebagai studi kasus. Selain KUD ini bergerak di sektor pertanian, Bank BUKOPIN juga menilai secara kualitatif KUD ini mempunyai prospek usaha yang cerah.

KUD Sejahtera Kademangan merupakan KUD yang bergerak disektor pertanian yaitu usaha perikanan jaring terapung. Seperti yang dihadapi oleh koperasi-koperasi lainnya, aspek permodalan merupakan salah satu kendala utama bagi KUD Sejahtera Kademangan. Adanya permasalahan tersebut

menyebabkan KUD Sejahtera Kademangan memerlukan bantuan dari lembaga keuangan untuk menyediakan fasilitas kredit. Dengan adanya Bank BUKOPIN sebagai bank koperasi maka KUD Sejahtera Kademangan dapat dengan mudah memperoleh fasilitas kredit untuk menunjang kelancaran usahanya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dalam praktek lapang ini akan dipelajari bagaimana peranan Bank BUKOPIN dalam menyalurkan kredit dan pembinaan serta bimbingan kepada koperasi dan pengaruh adanya kredit dan pembinaan serta bimbingan perbankan bagi perkembangan koperasi khususnya koperasi yang bergerak disektor pertanian (KUD Sejahtera Kademangan).

1.2. Perumusan Masalah

Masalah yang dihadapi oleh badan usaha yang berjenis koperasi di Indonesia antara lain keterbatasan didalam bidang permodalan, khususnya modal yang berasal dari dalam. Dalam rangka mengembangkan usaha, adanya masalah ini merupakan suatu hambatan yang berarti bagi koperasi. Perbankan sebagai lembaga yang berperan sebagai penyedia kredit bagi pengembangan usaha, pada kenyataannya cenderung untuk memberikan bantuan dananya kepada usaha-usaha yang komersial, cepat menghasilkan dan mempunyai tingkat resiko yang rendah, belum membantu koperasi-koperasi di Indonesia yang masih dianggap usaha non komersial untuk memperoleh kredit. Disamping itu, prosedur yang diajukan

bank untuk memperoleh pinjaman kredit yang rumit masih menyulitkan koperasi-koperasi sebagai pihak-pihak yang membutuhkan bantuan dana. Adapun masalah lain yang dihadapi oleh koperasi adalah kurang mampunya koperasi dalam mengelola sumber dana berupa kredit semaksimal mungkin untuk meningkatkan usahanya. Oleh karena itu pembinaan dan pengarahan Bank BUKOPIN sebagai bank koperasi yang memberikan bantuan kredit kepada koperasi sangatlah dibutuhkan, sehingga koperasi dapat memajukan usahanya dan dapat berperan dalam perekonomian nasional.

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari kegiatan praktek lapang ini adalah :

1. Mempelajari bagaimana peranan Bank BUKOPIN sebagai lembaga penyalur kredit bagi koperasi.
2. Mempelajari prosedur perkreditan yang diterapkan oleh Bank BUKOPIN bagi nasabahnya.
3. Mempelajari sampai sejauh mana usaha-usaha Bank BUKOPIN dalam realisasi dan pembinaan kredit terhadap para nasabahnya, terutama untuk koperasi.
4. Mempelajari perkembangan usaha pada KUD Sejahtera Kademangan dengan adanya kredit, pembinaan dan bimbingan yang diberikan oleh Bank BUKOPIN.

II. KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

2.1. Arti, Tujuan dan Fungsi Kredit.

Pengertian perkataan kredit telah dikenal oleh masyarakat secara luas. Hal tersebut dikarenakan kredit bukanlah merupakan istilah yang baru. Kata tersebut telah masuk ke dalam perbendaharaan Bahasa Indonesia walaupun pada mulanya berasal dari kata asing (Yunani : "Credere"), yang kemudian di Indonesiakan menjadi kredit dan dalam Bahasa Inggris "credit". Kredit secara harfiah dapat diartikan sebagai "kepercayaan", yaitu kepercayaan seseorang untuk melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa ikatan apa-apa kecuali suatu janji akan mengembalikan (pinjaman) pada waktu yang akan datang, baik dengan cara mengangsur atau melunasi sekaligus.

Didalam Undang-Undang Pokok Perbankan No. 14/1967, Pasal C, kredit didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga yang telah ditentukan.

Terdapat dua tujuan dari kredit :¹⁾

1. "Profitability"

Tujuan dari kredit adalah untuk memperoleh hasil berupa keuntungan yang berasal dari penarikan bunga.

1) Sinungan, M. 1978. Kredit Seluk Beluk dan Tehnik Pengelolaan. Penerbit YAGRAT Jakarta. Hal 14-18.

2. "Safety"

Keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan profitability dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan-hambatan yang berarti.

Untuk mencapai kedua tujuan diatas maka setiap kegiatan dari lembaga perbankan sebagai salah satu sarana pemberi fasilitas kredit dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar dapat menjamin rentabilitas serta penjagaan likuiditas sehingga dapat mencapai keuntungan dengan aman sebagaimana tujuan setiap usaha.

Fungsi kredit dalam kegiatan perekonomian, perdagangan dan keuangan dalam garis besarnya adalah sebagai berikut :¹⁾

1. Kredit dapat meningkatkan "utility" dari modal/uang.

Bank akan menampung uang dari para penabungnya dalam bentuk giro, deposit ataupun tabungan dimana dimana uang tersebut dalam prosentase tertentu ditingkatkan kegunaannya untuk meningkatkan produktivitas usaha dari bank yang bersangkutan. Salah satu usaha peningkatan produktivitas adalah dengan pemberian fasilitas kredit bagi para pengusaha, yang digunakan untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun usaha-usaha rehabilitasi serta untuk memulai usa-

¹⁾ Ibid.



ha baru. Pada dasarnya dengan adanya kredit maka akan dapat meningkatkan produktivitas secara menyeluruh.

2. Kredit meningkatkan "utility" sesuatu barang.

Produsen dengan bantuan kredit dari bank akan dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat. Produsen dengan bantuan kredit dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ketempat lain yang lebih bermanfaat.

3. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Kredit yang disalurkan melalui rekening-rekening koran menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, giro, bilyet dan sebagainya. Melalui kredit, peredaran uang chartal maupun giral akan lebih berkembang karena akan menciptakan suatu kegairahan dalam berusaha sehingga penggunaan uang akan lebih bertambah baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

4. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat.

Peningkatan usaha tidaklah selalu diikuti dengan peningkatan kemampuan. Oleh karena itulah maka manusia selalu berusaha untuk berhubungan dengan manusia lain guna memenuhi kekurangannya. Berdasarkan keadaan

an diatas maka pengusaha selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan berupa kredit untuk memperluas volume usaha dan produktivitasnya. Sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran, maka permintaan akan terus bertambah bila masyarakat telah memulai melakukan penawaran, sehingga timbul efek kumulatif oleh semakin besarnya permintaan secara berantai akan menimbulkan kegairahan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas.

5. Kredit sebagai alat stabilisasi ekonomi

Didalam perekonomian yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha : pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi prasarana dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Untuk menekan arus inflasi dan pembangunan ekonomi maka kredit bank memegang peranan yang penting. Arah kredit harus berpedoman pada segi-segi pembatasan kualitatif yaitu pengarahannya ke sektor-sektor produktif dan sektor sektor prioritas yang secara langsung berpengaruh pada hajat hidup masyarakat. Dengan perkataan lain setiap kredit harus benar-benar diarahkan untuk menambah "flow of goods" serta memperlancar distribusi barang-barang tersebut agar merata keseluruh lapisan masyarakat.

6. Kredit sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional.

Para pengusaha yang memperoleh kredit berusaha menggunakan kredit tersebut untuk meningkatkan usahanya yang berarti akan meningkatkan profitnya. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dan dikembalikan pada struktur pemodalannya, maka peningkatan akan berlangsung terus. Dengan pendapatan yang terus meningkat berarti pajak pendapatan pun akan terus bertambah. Di lain pihak kredit yang dimanfaatkan untuk merangsang kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa negara. Dengan demikian bila pendapatan rata-rata pengusaha meningkat, maka pendapatan negara melalui pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah sehingga secara langsung atau tidak melalui kredit pendapatan nasional bertambah.

2.2. Prosedur Umum Perkreditan¹⁾

Dalam pemberian fasilitas kredit, setiap permohonan diajukan oleh nasabah hingga tahap disetujui oleh bank dan akhirnya dapat digunakan oleh nasabah. Tahap-tahap tersebut meliputi :

1. Tahap pengajuan permohonan kredit,

¹⁾ Malik, R dkk. 1988. Dasar-Dasar Praktek Dan Kegiatan Usaha Bank. Yayasan Pembinaan Keluarga UPN. Hal. 105-124.

2. Tahap analisa kredit,
3. Tahap pemutusan kredit,
4. Tahap realisasi,
5. Tahap pengawasan,
6. Tahap penyelesaian kredit.

2.2.1. Tahap Pengajuan Permohonan Kredit.

Pada tahap ini nasabah mengajukan surat permohonan kredit yang berisi pemenuhan syarat-syarat yang diminta oleh bank dan dilampiri dengan data-data yang berisi antara lain : akte perusahaan, neraca, peredaran uang dan lain-lain. Surat permohonan tersebut oleh bank diolah dengan cara melihat dari informasi yang ada yang berupa data-data finansial dan data-data non finansial serta jaminan dari usaha pemohon, apakah sudah memenuhi syarat yang telah pihak bank tentukan. Selain itu, pihak bank juga melakukan pengumpulan informasi tentang calon anggota nasabah dengan cara pengumpulan data secara intern, pemeriksaan setempat dan informasi antara bank dan sebagainya.

2.2.2. Tahap Analisa Kredit

Terhadap permohonan kredit yang diajukan, maka bank akan melakukan analisa terhadap keadaan usaha si pemohon. Hal ini bertujuan agar kredit yang diberikan mencapai sasarannya (aman, teratur dan tepat waktu sesuai dengan perjanjian), terarah dan menghasilkan (dalam arti kredit tersebut memberi hasil kepada bank).

Analisa suatu permohonan kredit tergantung dari jenis-jenis usaha, sektor ekonomi, tujuan penggunaan kredit, dan sebagainya. Prinsip-prinsip yang digunakan untuk menganalisa permohonan kredit tersebut adalah prinsip 5 C, yaitu :¹⁾

1. "Character"

Character adalah penilaian terhadap karakter dari pemohon dengan menyelidiki secara seksama mengenai diri nasabah serta riwayat hidupnya. Pada dasarnya penilaian terhadap karakter ini untuk mengetahui sejauh mana itikad baik dan kemauan pemohon untuk melunasi pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

2. "Capacity"

Capacity adalah penilaian bank yang menyangkut kepada kemampuan si pemohon kredit untuk dapat mengembalikan kredit beserta bunganya tepat waktu. Selain itu juga bank melihat pengalaman, pengetahuan dan ketrampilan si pemohon untuk melaksanakan, mengurus dan mengembangkan usahanya dari kredit yang diminta, sehingga pada dasarnya penilaian terhadap kemampuan ini adalah menyangkut kemampuan si pemohon di dalam mengelola perusahaannya hingga berkembang.

¹⁾ Ibid. Hal 108.

3. "Capital"

Capital adalah penilaian yang meliputi struktur modal, yaitu tentang berapakah modal sendiri dan berapakah modal asing serta penggunaan dari permodalan tersebut. Penilaian atas besarnya modal ini penting untuk mengingat kredit yang diberikan bank hanya sebagai tambahan pembiayaan dan bukan untuk membiayai modal keseluruhan yang diperlukan. Untuk penilaian capital ini, kemampuan keuangan dinilai berdasarkan neraca dan daftar perhitungan rugi laba pada waktu-waktu yang lalu serta proyeksi peredaran keuangan dan proyeksi penghasilan yang diharapkan. Berdasarkan data-data tersebut disusun berbagai analisis keuangan seperti analisa likuiditas, analisa solvabilitas dan sebagainya.

4. "Collateral"

Collateral adalah barang-barang yang diserahkan peminjam sebagai jaminan terhadap kredit yang diterimanya. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana resiko tidak dipenuhinya kewajiban finansial kepada bank dapat tertutup oleh jaminan barang-barang tersebut. Secara umum jaminan terbagi menjadi dua yaitu jaminan fisik dan jaminan non fisik. Jaminan fisik berarti jaminan berbentuk barang, tanah, rumah dan surat-surat berharga dan lain

sebagainya. Jaminan non fisik berbentuk jaminan keyakinan tentang prospek dan kekuatan serta karakter yang dapat dipertanggung jawabkan.

5. "Condition of economy"

Condition of economy adalah penilaian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung terhadap kredit yang diberikan. Penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui sampai dimana faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap kegiatan usaha peminjam. Gambaran mengenai hal tersebut dapat dilihat melalui keadaan konjungtur, peraturan-peraturan pemerintah, keadaan dan kemungkinan pemasaran dan persaingan.

2.2.3. Tahap Pemutusan Kredit.

Pada tahap ini, Direksi bank berwenang atas pemutusan permohonan kredit. Hal ini dilakukan tanpa persetujuan dewan komisaris, kecuali pada hal-hal tertentu yang harus mendapat persetujuan dewan komisaris (biasanya menyangkut sektor ekonomi dalam jumlah tertentu). Apabila permohonan kredit ditolak maka penolakan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada sipemohon disertai alasan penolakan-penolakan. Sedangkan bila permohonan diterima, maka penerimaan tersebut disampaikan secara tertulis adanya yang berbentuk Surat Penegasan Pemberian Kredit (SPK) yang berisi syarat-syarat kredit dan prosedur

yang harus ditempuh si peminjam. Kemudian diadakan penandatanganan SPK yang merupakan bukti tertulis perikatan pinjam-meminjam antara nasabah dengan bank, yang kemudian dilanjutkan dengan pengikatan jaminan berupa jaminan pokok dan tambahan. Setelah tahap ini selesai, kredit dapat dicairkan oleh si peminjam.

2.2.4. Tahap Realisasi Kredit.

Tahap ini merupakan tahap pencairan kredit yang berarti setiap transaksi yang menggunakan fasilitas kredit yang telah disetujui oleh bank. Dalam prakteknya berupa pembayaran-pembayaran atau pemindah bukuan atas beban rekening pinjaman atau fasilitas lainnya.

Pencairan kredit yang telah disetujui dilakukan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh bank seperti dengan menarik cek, giro atau bilyet dan lain-lain.

2.2.5. Tahap Pengawasan Kredit

Didalam tahap pengawasan kredit ini yang menjadi sasaran adalah seluruh keadaan usaha dari nasabah, antara lain hubungan kredit antara bank dengan nasabah, karakter pengurus perusahaan dan keadaan perkembangan usahanya.

Pengawasan dilakukan dengan pengawasan pasif dan pengawasan aktif. Pengawasan pasif dilakukan atas dasar data atau laporan yang disampaikan oleh peminjam dan berdasarkan tata usaha yang ada pada bank. Pengawasan aktif dilakukan secara fisik melalui pemeriksaan langsung ditem-

pat, kegiatan usaha atau proyek dari nasabah yang dibiayai oleh kredit tersebut.

2.2.6. Tahap Penyelesaian Kredit.

Pada tahap ini debitur melakukan pelunasan terhadap hutang-hutangnya sehingga kredit dapat diselesaikan. Pada tahap penyelesaian, dibutuhkan informasi yang didapat dari pengawasan aktif dan pasif untuk dapat mengetahui kelancaran kegunaan dari kredit melalui ukuran kolektibilitasnya (kredit lancar, kurang lancar, kredit diragukan dan kredit rugi atau macet) yang ditentukan oleh faktor ketepatan waktu dan jumlah pembayaran hutang pokok dan bunga serta hasil penilaian kemampuan dan kemauan peminjam untuk melunasi hutang pokok dan bunganya.

2.3. Kredit Sebagai Modal Koperasi

Koperasi sebagai suatu bidang usaha tidak terlepas dari masalah permodalan yang biasa di hadapi oleh usaha-usaha yang lain. Hal ini disebabkan koperasi bukanlah merupakan kumpulan dari modal-modal melainkan kumpulan dari orang-orang, sehingga jika permodalan dari dalam kurang maka koperasi akan mengalami kesulitan untuk membiayai seluruh kegiatan usahanya.

Salah satu alternatif pemecahan masalah tersebut adalah dengan menambah permodalan dengan modal yang berasal dari luar. Dengan pertimbangan bahwa pada umumnya koperasi-koperasi di Indonesia belum merupakan suatu usaha

2.4.1. Analisa Likuiditas

Analisa likuiditas adalah analisa yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi hutang-hutang jangka pendeknya yang jatuh tempo.¹⁾ Penilaian likuiditas ditekankan pada kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendek (hutang lancar) dengan aktiva lancar yang dimiliki. Dalam penelitian ini pengukuran likuiditas menggunakan rasio lancar ("current ratio").

Rasio lancar ("current ratio") adalah pengukuran dengan membandingkan antara jumlah aktiva lancar dengan hutang lancar. Sebagai ukurannya, pada tingkat (2:1)=200% kondisi tersebut adalah cukup baik, yang mengandung arti setiap satu rupiah hutang lancar dijamin dengan dua rupiah aktiva lancar.²⁾

Rasio Lancar (Current Ratio) :³⁾

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Total Aktiva Lancar}}{\text{Total Hutang Lancar}}$$

(Rasio Lancar)

-
- 1) Weston J. Fred dan Eugene F. Brigham. 1988. *Managemen Keuangan, Edisi ke tujuh, Jilid 1*. Penerbit Erlangga. Jakarta. Hal. 115.
 - 2) Suad Husnan, Drs. 1982. *Dasar-dasar Managemen Keuangan (Pembelanjaan Perusahaan)*. Liberty. Yogyakarta. Hal. 59.
 - 3) Ikatan Akuntansi Indonesia. 1984. *Prinsip-Prinsip Akuntansi Indonesia 1984*. IAI. Jakarta. Hal. 30 dan Hal 44.



Aktiva Lancar digunakan untuk menyatakan kas atau bank dan sumber-sumber lain yang dapat diharapkan dapat dicairkan menjadi kas atau bank, dijual atau dipakai habis dalam satu tahun atau dalam siklus kegiatan normal perusahaan jika melampaui satu tahun. Aktiva lancar meliputi : uang kas, rekening giro bank, piutang usaha anggota, piutang usaha non anggota, piutang lain-lain, persediaan, pendapatan yang masih harus diterima.

Hutang Lancar meliputi hutang yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu satu tahun dengan menggunakan sumber-sumber yang merupakan aktiva lancar atau menimbulkan hutang lancar lainnya. Hutang lancar meliputi : hutang usaha, hutang bank, biaya yang masih harus dibayar, pendapatan yang ditangguhkan.

2.4.2. Analisa Solvabilitas

Analisa solvabilitas adalah analisa yang mengukur besarnya kemampuan perusahaan untuk membiayai hutang-hutangnya (jangka panjang, jangka pendek).¹⁾ Dalam penelitian ini pengukuran solvabilitas yang digunakan adalah "Net Capital Ratio".

"Net Capital Ratio" adalah perbandingan jumlah seluruh aktiva dengan jumlah seluruh hutang. Sebagai ukurannya, pada tingkat (1:1) = 100 persen keatas menunjukkan

¹⁾ Op. Cit. Weston J. Fred dan Eugene F. Brigham. 1988. Hal. 118.

keadaan yang makin baik.¹⁾

Net Capital Ratio :

$$\text{Net Capital Ratio} = \frac{\text{Total Aktiva}}{\text{Total Hutang}}$$

Total hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi. Total hutang meliputi hutang lancar dan hutang tetap.

Total aktiva adalah semua kekayaan perusahaan baik yang terwujud serta dalam penyelesaian. Total aktiva meliputi aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap dan aktiva lain-lain.

2.4.3. Analisa Profitabilitas

Analisa profitabilitas adalah analisa terhadap hasil bersih dari berbagai kebijaksanaan dan keputusan.²⁾ Apabila hasil diatas memberikan gambaran yang menarik dari kondisi keuangan perusahaan, maka rasio ini memberikan jawaban akhir tentang efektif perusahaan yang dikelola. Didalam penelitian pengukuran profitabilitas digunakan "Return On Net Worth".

1) Kadarsan, H.W. 1989. Keuangan Pertanian dan Pembiayaan Perusahaan Agribisnis. Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, IPB. Bogor. Hal. 94.

2) Suad Husnan, Drs. 1982. Dasar-dasar Managemen Keuangan (Pembelajaan Perusahaan). Liberty. Yogyakarta. Hal. 56-57.

"Return On Net Worth" adalah perbandingan antara laba setelah pajak dan modal sendiri yang merupakan tingkat keuntungan dari investasi pemilik modal sendiri. Apabila tingkat Return On Net Worth lebih besar dari Return on Net Worth Industri (21,6 persen), maka keseluruhan return on investment (yang dihitung setelah dikurangi bunga modal pinjaman) jatuh ke pemilik modal sendiri, sehingga tingkat keuntungan meningkat pesat.¹⁾

Return On Net Worth :²⁾

$$\text{Return On Net Worth} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Kekayaan Bersih}}$$

Laba bersih adalah pendapatan yang diterima setelah dikurangi harga pokok penjualan, beban usaha dan biaya lainnya.

Kekayaan bersih adalah modal dan surplus dari perusahaan, surplus modal (modal disetor), surplus yang diperoleh (laba yang ditahan), dan kadang-kadang, cadangan tertentu.³⁾ Kekayaan bersih meliputi simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan khusus, SHU sebelum dibagi dan SHU tahun berjalan.

1) Ibid. Hal. 61-63.

2) Op. Cit. Weston J. Fred dan Eugene F. Brigham. 1988. Hal. 123.

3) Ibid. Hal. 403.

III. METODOLOGI

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Praktek lapang ini dilaksanakan di Bank Bukopin. Studi kasus pada KUD Sejahtera Kademangan, yang merupakan KUD perikanan jaring terapung. KUD Sejahtera Kademangan adalah debitur dari Bank BUKOPIN. Pemilihan studi kasus KUD Sejahtera Kademangan pada praktek lapang ini ditentukan oleh Bank BUKOPIN yang disesuaikan dengan program studi dari penulis yaitu memilih KUD yang bergerak dibidang pertanian. Disamping itu secara kualitatif KUD ini dinilai Bank BUKOPIN sebagai usaha yang mempunyai prospek yang cerah. Praktek lapang ini dilakukan pada dua lokasi yaitu Bank BUKOPIN Pusat di Jalan MT Haryono Kav. 50-51, Jakarta Selatan dan pada KUD Sejahtera Kademangan di Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur. Pelaksanaan praktek lapang ini berlangsung selama lebih kurang satu setengah bulan, terhitung mulai bulan April 1991.

3.2. Pengumpulan Data

Pada praktek lapang ini data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilaksanakan dengan metoda survey, wawancara pada kedua belah pihak, yaitu staff dan karyawan pada Bank BUKOPIN dan pengurus-pengurus pada KUD Sejahtera Kademangan.

Hal Cipta (Intellectual Property) dan Hak Cipta (Copyright) adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau mempergunakan cipta tersebut, baik secara lisan maupun tulisan, untuk kepentingan ekonomi, kebudayaan, intelektual, dan lain-lain. Hal Cipta (Intellectual Property) dan Hak Cipta (Copyright) adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau mempergunakan cipta tersebut, baik secara lisan maupun tulisan, untuk kepentingan ekonomi, kebudayaan, intelektual, dan lain-lain.

Pengambilan data sekunder dilakukan pada dua lokasi yaitu Bank BUKOPIN di Jakarta dan KUD Sejahtera Kademangan di Kabupaten Cianjur. Data Sekunder yang diambil pada Bank BUKOPIN meliputi data manajemen dan organisasi, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga, hasil laporan penelitian Bank BUKOPIN serta data mengenai sejarah perkembangan Bank BUKOPIN. Sedangkan data sekunder yang dikumpulkan pada KUD Sejahtera Kademangan meliputi laporan keuangan (laporan neraca dan laporan rugi-laba), data manajemen dan organisasi serta catatan-catatan lain yang berhubungan dengan praktek lapang.

3.3. Pengolahan dan Analisa Data

Data yang dikumpulkan diolah dan hasilnya disajikan dalam bentuk tabulasi. Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan tehnik analisa laporan keuangan, yaitu analisa terhadap neraca dan rugi-laba untuk mengetahui perkembangan suatu usaha. Analisa terhadap laporan neraca digunakan untuk menggambarkan hasil operasi. Analisa yang digunakan adalah analisa rasio yang terdiri dari :

1. Analisa likuiditas,
2. Analisa solvabilitas,
3. Analisa profitabilitas.

3.3.1. Analisa Likuiditas

Analisa likuiditas yang digambarkan dengan rasio lancar ("Current Ratio") adalah analisa yang berguna untuk

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar (memenuhi) hutang jangka pendek (yang harus segera dipenuhi) dengan aktiva lancar (aktiva yang dapat segera diuangkan) yang dimiliki tanpa mengganggu jalannya kegiatan atau operasi dari perusahaan (Djarwanto PS, 1984).

Dalam praktek lapang ini, data yang digunakan untuk menghitung analisa likuiditas adalah laporan neraca KUD Sejahtera Kademangan dengan membandingkan antara total aktiva lancar dengan total hutang lancar selama dua tahun (1989-1990) setelah menjadi debitur Bank BUKOPIN.

3.3.2. Analisa Solvabilitas

Analisa solvabilitas yang digambarkan dengan "Net Capital Ratio" adalah pengukuran kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh hutang-hutangnya (hutang jangka pendek dan panjang), bila perusahaan dilikuidasikan.

Perhitungan analisa solvabilitas dalam praktek lapang ini berdasarkan laporan neraca KUD Sejahtera Kademangan, dengan membandingkan antara total aktiva dan total hutang selama dua tahun berturut-turut (1989-1990).

3.3.3. Analisa Profitabilitas

Analisa profitabilitas digambarkan dengan "Return On Net Worth" adalah pengukuran terhadap laba bersih setelah dikurangi pajak terhadap kekayaan bersih.¹⁾

¹⁾ Cp. Cit. Weston J. Fred dan Eugene F. Brigham. 1988. Hal. 123.

Dalam praktek lapang ini pengukuran "Return On Net Worth" berdasarkan laporan rugi-laba dan laporan neraca dengan membandingkan laba bersih dengan kekayaan bersih dari KUD Sejahtera Kademangan selama dua tahun (1989-1990) setelah menjadi debitur Bank BUKOPIN.



IV. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN BANK BUKOPIN

4.1. Sejarah Bank BUKOPIN

4.1.1. Perkembangan Bank BUKOPIN Sebagai Bank Koperasi

Bank Umum Koperasi Indonesia (BUKOPIN) berdiri pada tanggal 10 Juli 1970 di Jakarta. Namun penyelenggaraan usaha perbankan baru dimulai pada tanggal 17 Maret 1971. Hal tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep/078/DDK/II/3/1971, pada tanggal 16 Maret 1971. BUKOPIN terbentuk dari gabungan delapan induk koperasi yaitu : INKOPAL, IKPI, INKOPAD, IKPN, INKOPOL, INKOPAU, INKOVERI serta INKUD. Delapan induk koperasi fungsional tersebut sepakat untuk mendirikan sebuah bank yang dapat memberikan perhatian khusus kepada koperasi. Hal ini dikarenakan belum ada bank yang secara khusus memperhatikan dan mendukung perkembangan usaha dari koperasi.

Pembentukan BUKOPIN mengacu pada dua undang-undang yaitu UU NO.12/1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian dan UU No.14/1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Hal ini bertujuan agar terdapat dasar-dasar yang kuat didalam pendirian BUKOPIN sebagai usaha yang bergerak dibidang perbankan yang memprioritaskan pelayanannya kepada perkembangan dan kemajuan koperasi.

Ketika baru berdiri BUKOPIN hanyalah sebuah bank kecil yang menduduki ranking diatas 170 dari sekitar 200 bank yang ada di Indonesia dengan kantor pusat yang berlokasi di Jl. Kramat Raya, kemudian pindah ke Jl. Gunung Sa-

Hal Cipta: Penerbitan, Unsur-unsur
1. Ditinjau mengenai sebagai apa sebuah karya itu dipublikasikan dan dipublikasikan untuk
2. Pergerakan yang akan dilakukan setelah selesai, seperti: penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penelitian, dan lain-lain
3. Bagaimana cara mengorganisir karya ilmiah yang akan dipublikasikan
4. Bagaimana cara mengorganisir karya ilmiah yang akan dipublikasikan
5. Bagaimana cara mengorganisir karya ilmiah yang akan dipublikasikan

hari Raya dan di Jl. RS Fatmawati, Kebayoran. Namun sejak tanggal 12 Juli 1987 kantor pusatnya terletak pada Jl.MT Haryono No.50-51, Jakarta hingga kini.

Pada tahun 1983, pemerintah mulai menyadari perlunya pengembangan koperasi, sehingga untuk kepentingan tersebut diangkatlah Menteri Muda Koperasi. Untuk itu maka pemerintah meminta partisipasi dari Bank Duta untuk memberikan kredit bagi koperasi, dalam usaha pengembangan dan pembinaan koperasi serta penjelasan mengenai perbankan. Perkembangan dari usaha ini mengakibatkan kedudukan menteri muda koperasi naik posisinya menjadi Menteri Koperasi. Sejak itu koperasi diarahkan untuk memiliki bank sendiri, sehingga keluarlah kebijaksanaan, bahwa dilingkungan koperasi hanya diperbolehkan ada satu bank (bank tunggal). Konsekuensi dari adanya kebijaksanaan tersebut mengakibatkan bank-bank milik koperasi perlu segera merger menjadi satu bank besar. Diantara bank-bank milik koperasi yang ada, BUKOPIN terpilih menjadi "bank induk" koperasi. Terpilihnya BUKOPIN ini selain namanya telah mencerminkan sifat nasional, juga karena reputasi-reputasi para pendirinya yang berskala nasional.

Dalam usaha untuk mengembangkan BUKOPIN, maka dibentuk Tim Bantuan Teknis Bank Duta yang terdiri dari sekitar 20 orang staff bank Duta yang ditugaskan untuk membantu pengembangan BUKOPIN sesuai dengan keinginan

pemerintah, yaitu sebagai satu-satunya bank koperasi yang akan lebih berperan dalam gerakan koperasi.

Sesuai dengan hasil Rapat Anggota Biasa pada bulan Desember 1989, sejak tanggal 2 Januari 1990, nama BUKOPIN diubah menjadi Bank BUKOPIN yang kemudian disahkan pada Rapat Anggota Tahunan ke-17 pada tanggal 23 Maret 1990. Perubahan nama tersebut dimaksudkan untuk mendorong atau meningkatkan pelayanan Bank BUKOPIN sebagai bank yang profesional dan terpercaya. Selain itu juga untuk menegaskan identitas Bank BUKOPIN sebagai suatu usaha yang bergerak di bidang perbankan.

4.1.2. Keanggotaan Bank BUKOPIN

Keanggotaan dari Bank BUKOPIN adalah semua jenis koperasi yang berbadan hukum, baik koperasi sekunder tingkat propinsi maupun koperasi primer yang belum memenuhi syarat untuk memusatkan diri dalam koperasi tingkat atasnya (sekunder). Sejak pertama kali berdiri Bank BUKOPIN hanya terdiri dari delapan koperasi induk, kini jumlah tersebut berkembang menjadi 1658 koperasi yang terdiri atas 14 Induk Koperasi, 49 Pusat Koperasi, 39 Koperasi Pegawai/Karyawan dan enam gabungan koperasi dan 1550 koperasi primer.

Adanya perkembangan dari jumlah anggota Bank BUKOPIN karena semakin besarnya keinginan dari koperasi-koperasi tersebut untuk memajukan usahanya. Keinginan ter-

sebut dapat terwujud nyata dengan adanya bantuan fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank BUKOPIN. Disamping itu, menjadi anggota Bank BUKOPIN berarti menambah wawasan koperasi terhadap usaha perbankan.

Untuk menjadi nasabah sekaligus anggota Bank BUKOPIN, sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga BAB V Pasal 6, maka selain mengajukan surat permohonan secara tertulis, terdapat permintaan dari pihak Bank BUKOPIN untuk melampirkan :

1. Turunan Anggaran Dasar dan Surat Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum Koperasi.
2. Neraca tiga tahun berturut-turut yang telah di audit oleh KJA atau Akuntan Publik atau Pejabat.
3. Pernyataan tertulis tentang kesediaan tunduk pada segala ketentuan yang berlaku pada Bank BUKOPIN.
4. Pernyataan tentang kesanggupan membayar Simpanan Pokok sebesar Rp. 10.000.000,- dan Simpanan Wajib sebesar Rp. 50.000,- setiap bulannya.
5. Daftar nama Pengurus dan nama Badan Pemeriksa, dan jumlah anggota.
6. Rekomendasi dari koperasi tingkat atas bagi koperasi yang mempunyai koperasi sekunder dan bagi koperasi yang tidak mempunyai koperasi tingkat sekunder, rekomendasi diberikan oleh pejabat.

Setelah seluruh persyaratan dipenuhi oleh koperasi sebagai calon anggota dari Bank BUKOPIN, persetujuan atau

Sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga BAB VI Pasal 9, kewajiban anggota bank :

1. Turut serta memajukan usaha Bank BUKOPIN antara lain dengan cara menggunakan jasa-jasa Bank BUKOPIN dengan ketentuan apabila di tempat kedudukan anggota Bank BUKOPIN belum ada cabang, cabang pembantu atau perwakilan bank, anggota dapat menggunakan jasa-jasa bank lain.

2. Menjaga nama baik bank.

Sedangkan untuk hak-hak dari anggota bank yang sesuai dengan Pasal 10, adalah :

1. Memilih dan dipilih sebagai Pengurus maupun Badan Pemeriksa bank.
2. Mempergunakan hak suaranya dalam Rapat Anggota bank.
3. Meneliti kebenaran atas pembukuan, kekayaan bank serta ketatalaksanaan usaha bank yang dilaporkan oleh Pengurus Bank dan Badan Pemeriksa, kecuali yang termasuk rahasia bank.
4. Memberikan saran-saran baik lisan maupun tertulis untuk perbaikan organisasi, manajemen dan usaha bank.
5. Memperoleh fasilitas-fasilitas kredit serta bimbingan teknis yang diperlukan bagi kemajuan usahanya.

4.1.3. Struktur Organisasi dan Manajemen Tata Kerja

4.1.3.1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dari Bank BUKOPIN disusun dengan sistem kantor pusat dengan 19 buah kantor cabang dan 24 buah kantor cabang pembantu yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebagai bank tunggal koperasi, diharapkan dapat menyumbangkan bantuan bagi kemajuan koperasi di Indonesia. Hubungan antara kantor pusat dengan kantor cabang berdasarkan sistem dana pull, dimana bila ada cabang yang likuiditasnya turun maka dana dari cabang yang likuiditasnya tinggi oleh kantor pusat akan dialokasikan ke cabang yang likuiditasnya rendah.

Berdasarkan Surat Keputusan No.SKEP/239-DIREK/08/1990 pada tanggal 10 Agustus 1990, Direksi Bank BUKOPIN memutuskan untuk melakukan penyempurnaan kembali struktur organisasi Bank BUKOPIN. Untuk itu gambaran lengkap struktur organisasi pada kantor pusat, kantor cabang dan cabang pembantu disajikan pada Gambar 1., Gambar 2. dan Gambar 3.

Berdasarkan Gambar 1., Gambar 2. dan Gambar 3., struktur organisasi yang mengelola Bank BUKOPIN adalah Direktur Utama yang membawahi Direktur Pengawas, Direktur Operasi, Direktur Perkreditan dan Direktur Pembinaan Keuangan Koperasi untuk kantor pusat dan cabang, sedangkan untuk cabang pembantu dikelola oleh Pimpinan

Cabang yang membawahi Pimpinan Cabang Pembantu. Dalam Bank BUKOPIN orang-orang yang menduduki jabatan dalam struktur organisasi adalah orang-orang yang dalam melaksanakan tugasnya diberikan imbalan berupa gaji. Adapun pelaksanaan tugas-tugas tersebut berdasarkan hasil dari Rapat Anggota yang diadakan oleh Bank BUKOPIN.

4.1.3.2. Manajemen Tata Kerja

Untuk penyempurnaan manajemen tata kerja pada Bank BUKOPIN, maka Gubernur Bank Indonesia dan Menteri koperasi mengeluarkan surat keputusan bersama (SKB) No. 18/19/KEP/ GBI dan No. 02/SKB/M/II/86 tentang tata kerja Bank Umum Koperasi Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 5 Februari 1986.

Pada dasarnya Bank BUKOPIN adalah Bank swasta nasional, akan tetapi didalam pelaksanaan tata kerjanya menganut pada badan hukum koperasi. Hal ini terlihat dengan adanya simpanan wajib, simpanan pokok dan simpanan sukarela yang tercantum dalam syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon anggota Bank BUKOPIN. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kegiatan dalam Bank BUKOPIN adalah dari, oleh dan untuk anggota.

Sebagaimana pada koperasi, Bank BUKOPIN mempunyai tiga komponen alat perlengkapan yaitu : Rapat Anggota, Pengurus, dan Badan Pemeriksa. Sebagai pencerminan dari asas demokrasi pada koperasi maka kekuasaan tertinggi pada Bank BUKOPIN terletak pada Rapat Anggota.

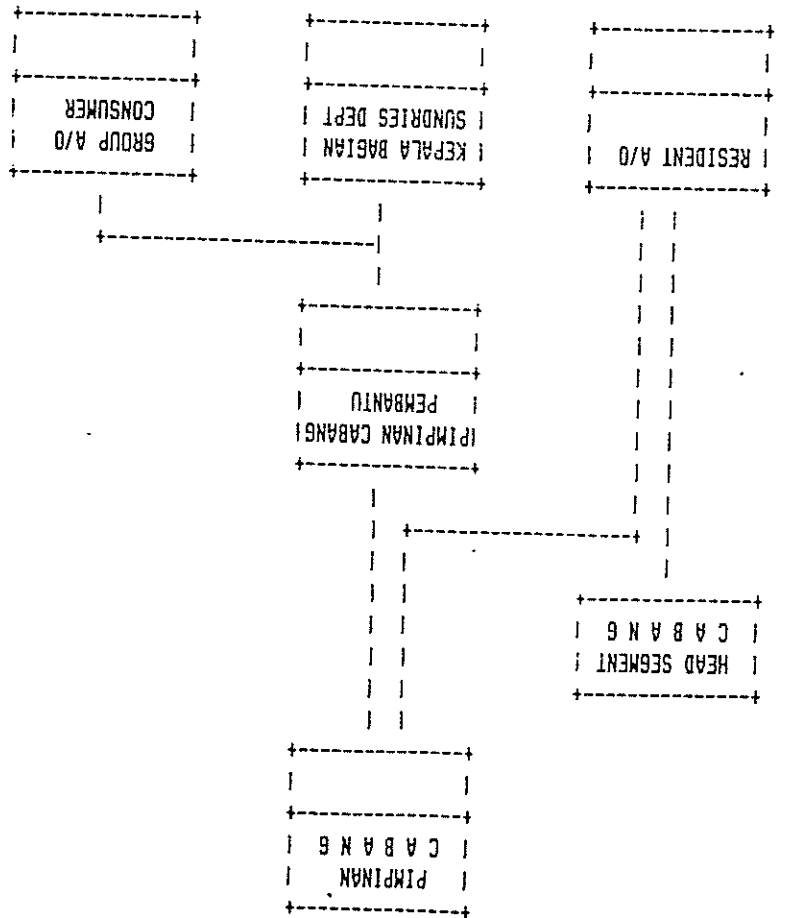


Halaman ini merupakan bagian dari dokumen yang diterbitkan oleh Institut Pertanian Bogor (IPB) dan tidak boleh disebarluaskan atau digunakan untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Institut Pertanian Bogor (IPB).
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya ini tanpa izin dari Institut Pertanian Bogor (IPB).
 2. Diperbolehkan untuk mengutip sebagian atau seluruh karya ini untuk keperluan akademik dan penelitian, dengan syarat:
 a. Mengutip dengan cara yang benar, dengan menyebutkan sumbernya.
 b. Tidak diperbolehkan untuk menyalin, mendistribusikan, atau menggunakan kembali karya ini untuk tujuan komersial.
 3. Dilarang menggunakan karya ini untuk tujuan politik, agama, atau tujuan lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai IPB.



SUMBER: LAPORAN TAHUNAN BANK BUKOPIN 1990

GAMBAR 3. STRUKTUR ORGANISASI CABANG PEMBANTU



Rapat Anggota

- Rapat Anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi merupakan pencerminan kebulatan keinginan anggota yang harus dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut maka keputusan Rapat Anggota didasarkan pada prinsip musyawarah untuk mufakat.
- Dalam Rapat Anggota Bank BUKOPIN yang diselenggarakan setiap tahun ditetapkan :
 1. Pembahasan dan pengesahan laporan dan pertanggung ja-waban pengurus, termasuk neraca, perhitungan rugi-laba serta sisa hasil usaha.
 2. Pembahasan dan pengesahan laporan Badan Pemeriksa.
 3. Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Pengurus dan Badan Pemeriksa.
 4. Penetapan anggaran dasar dan perubahannya.
- Pelaksanaan Rapat Anggota berdasarkan pada :
 1. Mirimal satu kali dalam satu tahun,
 2. Setiap waktu bila dirasakan perlu oleh pengurus atau pejabat,
 3. Berdasarkan permintaan secara tertulis dari setengah jumlah anggota.
- Jenis-jenis dari Rapat Anggota dapat berupa :
 1. Rapat Anggota biasa,
 2. Rapat Anggota khusus,
 3. Rapat Anggota luar biasa.



- kukan tindakan tercela dibidang perbankan.
- Anggota dari Pengurus terdiri dari lima orang, yaitu : ketua umum, ketua I, ketua II, sekretaris, bendahara. Didalam melaksanakan tugas-tugasnya, Pengurus memegang jabatannya selama lima tahun, dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Pada masa akhir jabatannya, salah seorang dari Pengurus lama akan kembali dipilih untuk kembali menjabat di dalam kepengurusan yang baru. Hal ini bertujuan agar kepengurusan terus berkesinambungan.
- Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Bank BUKOPIN, tugas-tugas yang harus dijalankan oleh anggota-anggota Pengurus adalah sebagai berikut :
1. Ketua umum dijabat oleh Drs. Abdul Gani
- Melakukan pengkoordinasian dan pengendalian terhadap setiap kegiatan dari Pengurus.
 - Menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan serta keputusan dalam Rapat Rapat Anggota.
 - Pengkoordinasian umum terhadap tugas pengawasan dan pembinaan terhadap aspek kehidupan Bank BUKOPIN.
 - Ketua Komite kredit bank bagi tingkat Pengurus.
 - Memimpin rapat koordinasi antara Badan Pemeriksa dan Direksi.



- Membina hubungan yang baik secara kelambagaan ke-luar baik lembaga bank maupun lembaga non bank.
- 2. Ketua I dijabat oleh Brigjen Surtiyono
 - Pengawasan serta pembinaan terhadap Direksi yang berkaitan dengan aspek operasional dan sumber daya manusia.
 - Mengalisa dan mengevaluasi laporan dari Direksi bank mengenai jalannya kegiatan bank.
 - Merupakan anggota komite kredit tingkat Peng-
rus.
 - Membantu ketua umum didalam membina hubungan baik dengan bank maupun non bank.
 - Mewakili ketua umum , bila berhalangan hadir.
- 3. Ketua II dijabat oleh H. Noorbasa Junaid
 - Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan dari Direksi bank yang berkaitan dengan aspek penyelenggaraan organisasi yang berhubungan dengan anggota bank dan gerakan koperasi.
 - Menganalisa dan mengevaluasi laporan Direksi bank tentang penyelenggaraan organisasi.
 - Anggota komite kredit tingkat Pengurus.
 - Membantu ketua umum dalam membina hubungan dengan lembaga bank dan non bank yang berkaitan dengan penyelenggarakan organisasi bank.

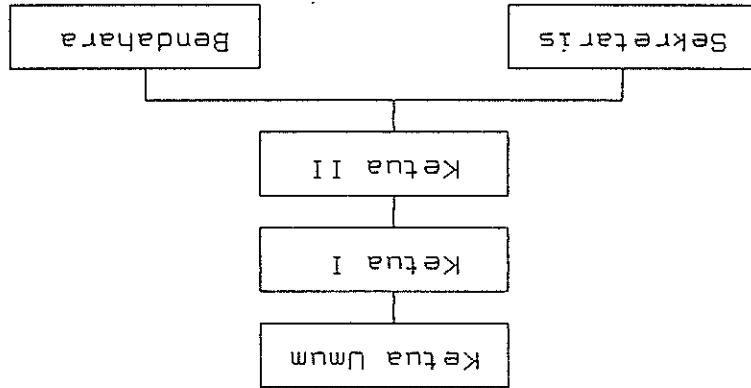
- Mewakili ketua umum dan ketua umum I dalam mengkoordinasi dan melaksanakan fungsi bila mereka berhalangan.
- 4. Sekretaris dijabat oleh Hufny, SH
 - Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan bank yang menyangkut aspek yuridis dan kelengkapan dokumen harta.
 - Anggota dari komite kredit tingkat Pengurus.
 - Membantu ketua umum melakukan hubungan-hubungan dengan koperasi-koperasi yang merupakan anggota dari bank.
 - Mengadakan pengaturan penyelenggaraan rapat yang akan diadakan oleh Pengurus.
 - Pelaksanaan tugas sekretariat terutama yang berhubungan dengan kewajiban Pengurus bank, seperti penyusunan atas laporan bank.
 - Pengaturan administrasi dan komunikasi antara Pengurus dengan pihak-pihak diluarnya.
- 5. Bendahara dijabat oleh Drs. Fauzan Mansyur
 - Pengawasan dan pembinaan terhadap bidang keuangan dan perbendaharaan termasuk aspek likuiditas, neraca dan rugi/laba.
 - Mewakili Pengurus dan bekerja sama dengan Direksi dalam memonitoring perkembangan dan penguasaan sumber dana.

Badan Pemeriksa

Alat perlengkapan yang ketiga adalah Badan Pemeriksa. Badan Pemeriksa ini bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Pengurus dan operasional bank apakah sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan rapat. Didalam melakukan pengawasan yang merupakan tugas Badan Pemeriksa, terdapat beberapa kewajiban yang harus dijalankan :

1. Pemeriksaan dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan.

Gambar 4. Struktur Pengurus Bank BUKOPIN



Gambar 4.

Struktur dari Pengurus Bank BUKOPIN disajikan pada

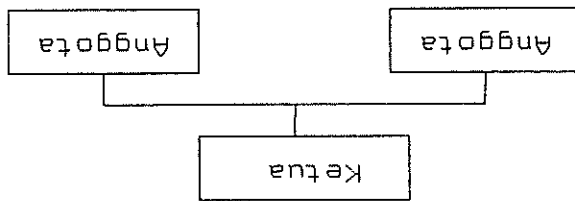
Tahunan dan untuk pemeriksaan Pejabat.

- Menyusun laporan keuangan untuk Rapat Anggota
- Anggota komite kredit tingkat Pengurus.
- dibidang keuangan.
- Membantu Ketua Umum dalam menetapkan kebijakan

2. Pencatatan mengenai dimulai dan diakhirinya masa jabatan Badan Pemeriksa.
 3. Mengadakan pertemuan secara berkala dengan Pengurus dan memberi saran didalam mengembangkan bank.
 4. Membuat laporan tertulis tentang hasil pemeriksaan yang akan disampaikan pada Rapat Anggota dan Pejabat Badan pemeriksa terdiri dari seorang ketua yang dibantu dengan dua orang anggota, yang berasal dari anggota Bank BUKOPIN yang koperasinya merupakan satu jajaran vertikal, dimana setiap koperasi itu hanya diwakili oleh satu orang.
- Badan Pemeriksa dipilih oleh anggota dalam Rapat Anggota. Terpilihnya anggota-anggota Badan Pemeriksa setelah terpenuhinya syarat-syarat : moral yang baik, pengetahuan yang luas mengenai perkerasian dan perbankan, mempunyai pengetahuan dibidang audit serta tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan negara dan gerakan per-operasian serta pada bidang perbankan. Jabatan dipegang oleh anggota Badan Pemeriksa selama tiga tahun can dapat kembali dipilih untuk sekali masa jabatan lagi.
- Pemeriksaan yang diadakan oleh anggota Badan Pemeriksa adalah :
1. Pelaksanaan dari keputusan-keputusan Rapat Anggota dan kebijaksanaan pengurus bank.

Sisa Hasil Usaha
 Pembagian keuntungan dalam Bank BUKOPIN kepada para anggotanya dilakukan setelah satu tahun perolehan hasil usaha koperasi.
 Sisa hasil usaha adalah penghasilan yang diperoleh setiap tahun setelah dipotong biaya dan penyusutan dalam tahun buku yang bersangkutan.
 Pembagian dari sisa hasil usaha dari usaha bank yang diselenggarakan bagi para anggota adalah sebagai berikut :

Gambar 5. Struktur Badan Pemeriksa Bank BUKOPIN



Gambar 5.

- Struktur Badan Pemeriksa Bank BUKOPIN disajikan pada
2. Pelaksanaan organisasi Bank BUKOPIN.
 3. Pelayanan terhadap gerakan koperasi.
 4. Pemeliharaan inventaris Bank BUKOPIN dan dokumen-dokumen yang berkaitan.
 5. Penyelenggaraan dan pemeliharaan buku-buku administrasi organisasi koperasi.

Didalam mengelola usaha perbankan, Bank BUKOPIN mendapat bantuan berupa bimbingan dan pengawasan dari sebesar 20 persen.

sipasi anggota yang sama dengan persentase simpanannya itu (simpanan). Hal ini terlihat dalam persentase dari partisipasi anggota yang sama dengan peran modal.

Dari pembagian sisa hasil usaha ini, Bank BUKOPIN

1. 85 persen untuk cadangan.
2. 2 persen untuk Badan Pengurus dan Badan Pemeriksa.
3. 5 persen untuk Direksi dan Karyawan.
4. 2 persen untuk Dana Sosial.
5. 5 persen untuk Dana Pendidikan.
6. 1 persen untuk Dana Pembangunan Wilayah Kerja.

berikut :

diseleenggarakan bagi para anggota adalah sebagai

Pembagian sisa hasil usaha dari bank yang

1. 50 persen untuk cadangan.
2. 20 persen untuk anggota disesuaikan dengan jasanya.
3. 20 persen untuk anggota disesuaikan dengan simpanan
4. 2 persen untuk pengurus dan badan pemeriksa.
5. 5 persen untuk dana Direksi dan Karyawan.
6. 1 persen untuk dana sosial.
7. 1 persen untuk dana pendidikan.
8. 1 persen untuk dana pembangunan.



4.2. Keduadukan Bank BUKOPIN dalam Sistem Perbankan

Didalam sistem Perbankan, Bank BUKOPIN berjenis Bank swasta nasional yang juga merupakan bank koperasi satu-satunya di Indonesia. Setelah 21 tahun berdiri keduadukan Bank BUKOPIN sebagai Bank Umum Swasta Nasional berdasarkan neraca per Juli 1989 dengan nilai ROE (Return On Equity) sebesar 12,7 persen, Bank BUKOPIN menduduki peringkat ke-23.¹⁾ Pada kriteria ini digambarkan besarnya keuntungan yang diperoleh Bank BUKOPIN dari setiap uang yang ditanamkan oleh para pemegang saham.

Berdasarkan nilai dari ROI (Return On Investment), Bank BUKOPIN menduduki peringkat yang lebih rendah dari nilai ROE yaitu peringkat ke-27 dengan nilai yang telah dicapai sebesar 0,72 persen.²⁾ Kriteria ini menggambarkan produktivitas dari Bank BUKOPIN, yaitu menggambarkan jumlah dana yang berhasil dikumpulkan oleh Bank BUKOPIN dan dipakai untuk menghasilkan sejumlah laba tertentu.

Amal Taufiq, Juli 1990. Bank Terbesar dan Tersehat. Yayasan Sembada Swakarya. Hal.36-37

Departemen Koperasi, Bank Indonesia dan Departemen Keuangan. Hal-hal yang menyangkut organisasi perkerjasama bimbingan dan pengawasan dilakukan oleh Departemen Koperasi, sedangkan yang menyangkut organisasi dan teknis Perbankan dilaksanakan oleh Bank Indonesia dan Departemen Keuangan.

Untuk mengetahui tingkat efisiensi maka digunakan

kriteria Marginal Product (MP). Berdasarkan nilai Margi-
nal Product, Bank BUKOPIN menduduki peringkat ke-26,
diantara jenis bank umum swasta nasional dengan nilai
sebesar 6,17 persen.¹⁾ Pada kriteria ini digambarkan be-
rapa besar Bank BUKOPIN dapat menekan biaya untuk mengha-
silkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Dari kedudukan yang telah dicapai tersebut maka dapat
ditunjukkan bahwa sebagai bank umum swasta nasional Bank
BUKOPIN telah menunjukkan prestasi yang mengembirakan
yaitu pengumpulan asset sebesar Rp. 681.856.000.000,-
yang menduduki peringkat ke-14, dimana sebagai bank swasta
Bank BUKOPIN dapat bersaing dengan bank lainnya.²⁾
Sedangkan sebagai bank koperasi, dengan potensi yang ada
maka Bank BUKOPIN menunjukkan prospek yang baik didalam
menjalankan perannya menunjang kemajuan dari koperasi-
koperasi yang ada di Indonesia.

4.3. Peranan dan Tugas Bank BUKOPIN

Sebagai bank swasta nasional, Bank BUKOPIN mempunyai
peranan dan tugas yang harus dijalankan. Adapun peranan
dasar dari Bank BUKOPIN adalah sebagai pilar utama untuk
menunjang kemajuan koperasi. Didalam menjalankan
perannya terdapat misi-misi dari Bank BUKOPIN yang
terdiri dari :

1,2) Ibid.

1. Menyalurkan kredit kepada koperasi.
2. Keselamatan bagi para koperasi yang menjadi anggota-anggota yang lebih rendah dari rate umum, penentuan rate bagi para anggota yang lebih rendah dari rate non anggota.
3. Apabila suku bunga tinggi, maka pemberian kredit kepada koperasi yang masih lemah manajemen dan finansialnya tetap dilaksanakan dengan suku bunga yang rendah. Untuk itu maka Bank BUKOPIN bekerja sama dengan Departemen Koperasi dan Bank Indonesia untuk memperoleh kredit likuiditas sehingga dapat diperoleh pinjaman dana dengan bunga yang rendah.
4. Dalam pemberian jaminan, untuk koperasi yang masih lemah maka Perum PKK akan menjamin kredit koperasi. Secara teknis dengan jaminan dari Perum PKK, KUD Non Mandiri dari batas maximum pemberian kredit harus menanggung 1 persen sedangkan Bank BUKOPIN menanggung

0,5 persen (Perum PPK membebankan Fee sebesar, 1,5 persen dari batas maximum pemberian kredit).

Sedangkan tugas-tugas yang harus dijalankan oleh Bank BUKOPIN sebagai berikut :

1. Bank BUKOPIN sebagai Intermedier, yaitu sebagai lembaga perantara dari lembaga yang Surplus Fund (mempunyai dana berlebih) ke lembaga yang Deficit Fund (mengalami kekurangan dana). Bagi lembaga yang Surplus Fund, maka Bank BUKOPIN menarik sejumlah dana masyarakat dalam bentuk giro, deposit dan tabungan. Sedangkan lembaga yang Deficit Fund, Bank BUKOPIN menyalurkan dana yang ditarik dari masyarakat yang berupa giro, deposit dan tabungan.
2. Bank BUKOPIN memberikan jasa-jasa perbankan, seperti mengadakan transfer, inkaso, clearing dan safe deposit box.
3. Bank BUKOPIN memberikan kredit bagi nasabahnya yang disertai dengan berbagai kemudahan baik dalam tingkat suku bunga, prosedur perkreditan maupun didalam pembayaran kembali dari kredit yang telah digunakan.

4.4. Bank BUKOPIN Sebagai Penyalur Kredit Bagi Koperasi

Bank BUKOPIN sebagai bank yang berbadan hukum koperasi, menempati posisi yang strategis dalam menunjang permodalan koperasi. Hal ini terlihat dengan penyaluran sebagian dana Bank BUKOPIN dalam bentuk kredit kepada koperasi-koperasi.

Secara nasional, penyaluran kredit kepada koperasi masih relatif kecil dan kurang berkembang bila dibandingkan dengan penyaluran kredit secara keseluruhan yang bernilai rata-rata di bawah satu persen (1986-1990). Kecenderungan yang menurun dalam penyaluran kredit koperasi disebabkan adanya kenaikan kredit non koperasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kredit koperasi. Hal ini terlihat pada tahun 1986 dimana perbandingan antara jumlah dana yang disalurkan untuk total kredit dengan total kredit kepada koperasi sebesar 1.2 persen menurun menjadi 0.6 persen pada tahun 1990. (Tabel 1.)

Bank BUKOPIN memiliki andil (market share) yang cukup besar dalam menyalurkan kreditnya kepada koperasi. Hal ini terlihat pada tahun 1990 dimana perbandingan antara kredit koperasi Bank BUKOPIN dengan total kredit yang disalurkan kepada koperasi di seluruh Indonesia mencapai 58 persen, atau dengan rata-rata 44 persen (1986-1990).

Sumber dana Bank BUKOPIN berasal dari dana masyarakat dana yang berasal dari koperasi. Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa perkembangan dana dari koperasi meningkat. Hal ini terlihat dalam tahun 1988 sumber dana koperasi sebesar Rp. 52.114 juta meningkat menjadi Rp. 65.535 juta pada tahun 1990. Demikian pula dengan persentase sumber dana dari koperasi atas dana dari masyarakat yang meningkat dari tahun 1988 sebesar 11 persen hingga tahun 1990 menjadi 14 persen. Peningkatan ini merupakan perwujudan peranan dari Bank BUKOPIN selaku "intermedier" bagi koperasi yaitu selain menyalurkan kredit kepada kope-

Sumber : Laporan Tahunan BI 1989 yang diolah Bank BUKOPIN

NO	URAIAN	1986	1987	1988	1989	1990
1.	Kredit yang disalurkan	24.41	27.888	35.801	45.718	71.564
2.	Total kredit ke-pada koperasi	200	275	340	405	416
3.	Kredit Koperasi di Bank BUKOPIN	36	98	204	221	240
4.	% (2/1)	1,24	1,02	0,92	0,92	0,64
5.	% (3/2)	12,02	26,12	60,02	55,02	58,02

Tabel 1. Perkembangan Kredit Pertanian di Bank BUKOPIN (1986-1990)



Total pinjaman yang diberikan Bank BUKOPIN mengalami peningkatan selama enam tahun terakhir (1986-1991). Hal ini terlihat pada Tabel 3., dimana pinjaman tersebut disalurkan kepada koperasi dan non koperasi, yaitu umum dan perorangan. Dari pinjaman yang diberikan Bank BUKOPIN, jumlah pinjaman kepada sektor koperasi mengalami peningkatan. Hal ini terlihat tahun 1986 dimana jumlah pinjaman kepada sektor koperasi sebesar Rp. 56.800 juta terus meningkat hingga tahun 1991 mencapai jumlah pinjaman

Sumber : Diolah oleh Bank BUKOPIN

NO.	U R A I A N	1988	1989	1990
1.	Total dana masyarakat	464.264	497.161	459.439
2.	Sumber dana dari koperasi	52.114	59.811	65.535
3.	Total Dana Bank BUKOPIN	516.378	556.373	524.974
4.	% Dana Koperasi atas total dana masyarakat	11%	12%	14%

Tabel 2. Perkembangan Sumber dan Alokasi Dana Bank BUKOPIN Tahun 1989-1990 (dalam jutaan rupiah)

akhirnya bank-bank baru. semakin kerasnya persaingan dalam sektor perbankan dengan runan pada tahun 1990 sebesar Rp. 524.974 juta dikarenakan koperasi. Secara total dana Bank BUKOPIN mengalami penurunan juga menjadi lembaga penabung dana bagi koperasi-

Misi Cipta, Inovasi, dan Unggul
 1. Ditingkatkan sebagai salah satu sumber daya manusia yang unggul dan inovatif
 2. Peningkatan hasil kerja sebagai sumber daya manusia yang unggul dan inovatif
 3. Peningkatan hasil kerja sebagai sumber daya manusia yang unggul dan inovatif
 4. Peningkatan hasil kerja sebagai sumber daya manusia yang unggul dan inovatif
 5. Peningkatan hasil kerja sebagai sumber daya manusia yang unggul dan inovatif
 6. Peningkatan hasil kerja sebagai sumber daya manusia yang unggul dan inovatif
 7. Peningkatan hasil kerja sebagai sumber daya manusia yang unggul dan inovatif
 8. Peningkatan hasil kerja sebagai sumber daya manusia yang unggul dan inovatif
 9. Peningkatan hasil kerja sebagai sumber daya manusia yang unggul dan inovatif
 10. Peningkatan hasil kerja sebagai sumber daya manusia yang unggul dan inovatif

Kategori	1986 (a)		1987		1988		1989 (b)		1990 (c)		1991
	Pinjaman Bank BUKOPIN	Pinjaman Bank BUKOPIN kepada Koperasi	Pinjaman Bank BUKOPIN	Pinjaman Bank BUKOPIN kepada Koperasi	Pinjaman Bank BUKOPIN	Pinjaman Bank BUKOPIN kepada Koperasi	Pinjaman Bank BUKOPIN	Pinjaman Bank BUKOPIN kepada Koperasi	Pinjaman Bank BUKOPIN	Pinjaman Bank BUKOPIN kepada Koperasi	
1. Total Pinjaman	151.405	297.502	326.554	388.425	773.719	764.020					
2. Pinjaman Bank BUKOPIN kepada Koperasi	56.800	98.348	204.406	217.978	262.203	245.946					
3. Pinjaman Bank BUKOPIN kepada Koperasi	95.105	199.154	322.094	370.674	511.516	538.074					
4. % (B/1)	37%	33%	39%	37%	34%	31%					
5. % (B/2)	52%	67%	61%	63%	66%	69%					
6. % (B/3)	56%	49%	64%	59%	61%	45%					

Table 3. Pinjaman yang Diberikan Bank BUKOPIN (dalam jutaan rupiah) 1986-1991

Table 3. Pinjaman yang Diberikan Bank BUKOPIN (dalam jutaan rupiah) 1986-1991. Bila dilihat dari persentase pinjaman Rp. 245.946 juta. Bank BUKOPIN, rata-rata persentase pinjaman kepada sektor koperasi terhadap persentase pinjaman non koperasi (1986-1991) sebesar 54%, artinya pinjaman kepada non koperasi rata-rata dua kali lebih besar dari pinjaman kepada koperasi.

4.4.1. Persyaratan dan Prosedur Kredit Bank BUKOPIN

Bagi perkembangan usaha koperasi, Bank BUKOPIN menyediakan bantuan berupa pemberian kredit bagi koperasi-koperasi yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh Bank BUKOPIN. Bantuan tersebut dipergunakan untuk menunjang usaha memperbesar skala usaha sehingga akan mendatangkan keuntungan yang besar bagi koperasi.

Dalam memperoleh kredit, koperasi harus mengikuti prosedur-prosedur dan syarat-syarat yang telah ditentukan Bank BUKOPIN. Penetapan prosedur dan syarat-syarat oleh pihak Bank BUKOPIN dilaksanakan agar tidak memberatkan pihak koperasi, sehingga koperasi yang berkepentingan tidak merasa enggan untuk mengajukan permohonan kredit kepada Bank BUKOPIN.

Untuk memperoleh fasilitas kredit Bank BUKOPIN, maka persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi adalah :

1. Membuat surat permohonan kredit dengan isi tentang jumlah kredit yang diminta, jangka waktu, rencana penggunaan dan sumber penghasilan kredit.
2. Menyertakan surat rekomendasi dan klasifikasi koperasi dari Departemen Koperasi (Kankop, Kanwikop, Ditjen Binskop).
3. Melampirkan akte pendirian/anggaran Dasar koperasi dan perubahan-perubahannya serta pengesahan badan hukum.

Hal. 5 dari 10 halaman | Universitas IPB
1. Ditinjau mengenai sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi dan membatasi sumber
4. Kegiatan yang akan dilaksanakan sendiri, seperti, pembelian barang, jasa, sewa, dan lain-lain
5. Kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menggunakan tenaga kerja, seperti, gaji, upah, dan lain-lain
6. Kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menggunakan modal, seperti, investasi, dan lain-lain
7. Kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menggunakan tenaga kerja, seperti, gaji, upah, dan lain-lain
8. Kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menggunakan modal, seperti, investasi, dan lain-lain
9. Kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menggunakan tenaga kerja, seperti, gaji, upah, dan lain-lain
10. Kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menggunakan modal, seperti, investasi, dan lain-lain

5. Surat kuasa dari Pengurus dan beberapa orang Pengurus yang dikiasakan untuk menandatangani akad kredit pada Bank BUKOPIN diatas materai Rp. 1.000,-
 6. Neraca dan laporan R/L koperasi selama dua tahun.
 7. Fotocopy KTP/tanda pengenal, untuk seluruh Pengurus koperasi.
 8. Proyeksi Rugi-Laba dan Cash Flow.
 9. Susunan Pengurus, Badan Pemeriksa koperasi yang terbaru beserta tahun periodenya yang telah disahkan oleh Departemen Koperasi.
 10. Susunan manajemen dan personalia koperasi.
 11. NPWP, SIUP, TDP, Surat Keterangan Izin Domisili.
 12. Laporan hasil RAT (Rapat Anggota Tahunan).
 13. Sejarah dan perkembangan koperasi.
 14. Hasil study kelayakan (feasibility study).
 15. Daftar riwayat hidup dan pengalaman usaha Pengurus, Badan Pemeriksa, dan Manager koperasi.
 16. Menyediakan jaminan kredit.
 17. Foto lokasi usaha.
 18. Izin-izin lain bila diperlukan.
- Adapun syarat-syarat untuk membuka rekening kredit koperasi pada Bank BUKOPIN adalah sebagai berikut :
1. Fotocopy tanda pengenal (KTP) seluruh pengurus lengkap.
 2. Fotocopy tanda pengenal penanda tangan.



4.4.2. Pembinaan Bank BUKOPIN Terhadap Koperasi Nasabah
Jenis dari kredit yang diberikan Bank BUKOPIN kepada koperasi/KUD adalah jenis kredit yang dibina dimana

dari jumlah kredit yang diberikan Bank BUKOPIN. dijamin oleh Perum PKK memberikan jasa berupa satu persen koperasi yang macet. sebagai imbalannya koperasi yang mempunyai jaminan. Perum PKK akan menjamin kredit sama dengan Perum PKK dalam membantu koperasi yang tidak kepada koperasi. Dalam hal jaminan, Bank BUKOPIN bekerja Bank BUKOPIN memberikan kerincian-kerincian tertentu tidak mempunyai jaminan atas kreditnya. Oleh karena itu kesanggupan pemberian jaminan. Untuk koperasi umumnya Setiap pengajuan kredit selalu disertai dengan disediakan oleh Bank BUKOPIN.

9. Menanda tangani formulir dan syarat umum yang telah
8. Setoran pertama minimal Rp. 500.000,-
7. Referensi bank atau referensi dari nasabah Bank BUKOPIN.
6. NPWP, SIPP, TDP
diatas materai Rp. 1.000,-
5. Surat kuasa seluruh Pengurus kepada penanda tangan Koperasi.
4. Susunan pengurus yang telah disyahkan oleh Departemen perubahannya serta pengesahan sebagai badan hukum.
3. Akte pendirian/Anggaran Dasar koperasi dan perubahan-



setelah pemberian kredit tersebut Bank BUKOPIN dengan ban-
 tuan Departemen Koperasi terus mengadakan pembinaan,
 bimbingan dan pengawasan terhadap koperasi sejak dari
 perencanaan, pengajuan, penggunaan sampai pada
 pengembalian kredit.

Dalam perencanaan kredit, Bank BUKOPIN memberikan
 petunjuk dalam pembuatan perencanaan yang disesuaikan
 dengan kemampuan organisasi dan manajemen dari masing-
 masing koperasi.

Dalam pengajuan kredit, Bank BUKOPIN memberikan
 penerangan mengenai cara-cara pengajuan permohonan kredit
 secara lengkap yang disesuaikan dengan persyaratan dan
 prosedur yang berlaku.

Pada realisasi kredit, Bank BUKOPIN berusaha
 mengarahkan koperasi agar setiap penggunaan dari pencairan
 kredit koperasi benar-benar sesuai dengan rencana yang
 telah diajarkan.

Penggunaan dari kredit yang diberikan kepada koperasi
 tidak luput dari pengawasan dan pemeriksaan Bank BUKOPIN
 yang bertujuan untuk mencegah adanya penyimpangan penggu-
 naan kredit. Apabila telah terjadi penyimpangan dari
 kredit yang telah diberikan, maka langkah-langkah peng-
 amanan meliputi penarikan kredit bagi koperasi yang ber-
 sangkutan, mengusahakan penagihan kembali kredit yang
 telah digunakan meskipun belum jatuh tempo.

Pada tahap pengembalian kredit, Bank BUKOPIN berusaha untuk mengarahkan dan mengawasi kewajiban membayar sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan (tepat waktu).

Disamping usaha-usaha diatas, Bank BUKOPIN juga selalu berusaha untuk berhubungan dengan koperasi yang menjadi nasabahnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Pembinaan secara tidak langsung ialah dengan menetapkan disiplin bagi para nasabahnya untuk melaporkan laporan keuangannya setiap bulan atau paling lambat triwulan. Sedangkan pembinaan secara langsung dilakukan dengan mengadakan kunjungan perseorangan dan pengarahannya langsung kepada koperasi yang sedang mengalami kredit masalah. Hal ini dilaksanakan agar koperasi yang bersangkutan mempunyai kepercayaan kembali dan optimis didalam melanjutkan usahanya.

Dari usaha-usaha yang telah dilakukan Bank BUKOPIN, tujuan yang ingin dicapai adalah pemberian kredit tersebut diharapkan dapat mendatangkan manfaat yang besar bagi koperasi yang bersangkutan sehingga memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia.



V. GAMBARAN UMUM KUD SEJAHTERA KADEMANGAN

KUD Sejahtera Kademangan digunakan sebagai studi kasus didasarkan atas latar belakang dari penulis yaitu sosial ekonomi pertanian, yang bertujuan untuk mengetahui peranan Bank BUKOPIN pada koperasi di sektor pertanian.

Kredit Bank BUKOPIN kepada koperasi yang bergerak di sektor pertanian masih rendah bila dibandingkan dengan koperasi di sektor non pertanian. Hal ini terlihat dari rata-rata persentase kredit yang disalurkan kepada koperasi pertanian 35 persen, sedangkan pada koperasi non pertanian sebesar 65 persen. Hal ini karena usaha untuk merangkul koperasi-koperasi yang bergerak di sektor pertanian baru dilakukan Bank BUKOPIN. Disamping itu masih banyak koperasi-koperasi pertanian yang belum dapat memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Bank BUKOPIN.¹⁾

Penetapan KUD Sejahtera Kademangan sebagai studi kasus oleh Bank BUKOPIN didasarkan atas penilaian selain koperasi ini bergerak disektor pertanian yaitu perikanan jaring terapung, Bank BUKOPIN juga melihat bahwa prospek usaha dari KUD ini cukup baik. Disamping itu diantara koperasi-koperasi pertanian yang umumnya belum memperlihatkan hasil dari kredit yang diberikan Bank BUKOPIN, KUD Sejahtera Kademangan ini termasuk koperasi nasabah yang sudah dapat memperlihatkan hasil.

1) Hasil wawancara dengan karyawan Bank BUKOPIN.





5.1. Sejarah KUD Sejahtera Kademangan¹⁾

KUD Kademangan sudah berdiri sejak tahun 1973, hingga tahun 1988 telah mengalami lima kali pergantian kepemimpinan. Didalam periode 1973-1988 KUD Kademangan berada dalam kondisi yang buruk, dimana terjadi kekakuan didalam kegiatan KUD ini, walaupun bantuan dari pemerintah terus berjalan. Untuk itu maka diadakan rekayasa koperasi untuk memperbaiki kondisi ini, yaitu dengan mengadakan rapat luar biasa yang diadakan pada tanggal 28 Agustus 1988. Rapat tersebut membahas tentang pertanggung jawaban pengurus lama, memilih pengurus baru serta menetapkan program kerja yang akan datang.

Untuk memperbaiki kondisi tersebut maka KUD Kademangan bersatu dengan KOMDA PRIM KOBARI Kabupaten Cianjur untuk mengajukan bantuan permodalan berupa kredit kepada Bank BUKOPIN. Bantuan pertama yang diberikan Bank BUKOPIN pada tanggal 10 Januari 1989 berupa modal sebesar Rp. 60.000.000,-.

Penggunaan bantuan dari Bank BUKOPIN itu mengalami kerugian. Hal ini disebabkan KUD baru memulai usaha-usahanya dalam mencari celah-celah untuk pemasaran sehingga banyak membutuhkan dana untuk menemukan lokasi pasar yang tepat. Disamping itu juga KUD mengalami kegagalan-kegagalan didalam mengadakan berbagai percobaan-kegiatan.

Laporan Hasil Pemeriksaan KUD Sejahtera Kademangan 1990 Tahun Buku 1990.

percobaan untuk menemukan produk pakan yang bermutu baik.

Setelah kredit pertama yang di berikan Bank BUKOPIN mengalami kerugian, maka KUD Kademangan mengajukan bantuan kredit yang kedua dan memisahkan diri dari KOMDA PRIM KOBARI dengan nama baru KUD Sejahtera Kademangan, yang merupakan hasil rapat pembentukan pada tanggal 17 Mei 1989.

5.2. Bentuk Organisasi dan Manajemen KUD Sejahtera

Kademangan

KUD Sejahtera Kademangan yang sudah terbentuk mempunyai anggota 390 orang. KUD ini merupakan koperasi primer yang terdiri dari para petani ikan yang menjalankan usaha perikanan pada Waduk Cirata yang merupakan perikanan jaring terapung. KUD ini memperoleh pengesahan dari badan hukum sesuai dengan tanggal terbentuknya yaitu tanggal 17 Mei 1989 dengan nomor badan hukum 5632 A/BH/KWK-10/7.

Latar belakang dari KUD Sejahtera Kademangan adalah para petani perikanan yang diharuskan menjadi anggota KUD jika ingin menjalankan usahanya pada Waduk Cirata. Hal ini dilaksanakan bekerja sama dengan Perda (Pemerintah Daerah) yang mengurus masalah perizinan usaha. Dengan semakin bertambahnya jumlah petani yang menjalankan usahanya di Waduk Cirata, maka semakin bertambah pula jumlah anggota dari KUD Sejahtera Kademangan.



KUD Sejahtera Kademangan yang mempunyai enam wilayah kerja ini terdiri dari lima unit kerja agar dapat mempermudah pengelolaannya. Setiap unit kerja ditangani oleh seorang manager yang dibantu dengan dua orang karyawan, sehingga pelaksanaan setiap unit kerja dapat terlaksana dengan baik.

Didalam pengelolaannya KUD Sejahtera Kademangan mempunyai alat-alat perlengkapan koperasi yang terdiri dari :

1. Rapat Anggota,
2. Pengurus,
3. Badan Pemeriksa.

5.2.1. Rapat Anggota

Sesuai dengan asas demokrasi yang ada didalam koperasi, maka Rapat Anggota merupakan kekuasaan yang tertinggi dalam KUD Sejahtera Kademangan. Rapat Anggota diadakan minimum satu kali dalam setahun untuk meminta pertanggungjawaban pengurus yang dihadiri oleh seluruh anggota, dimana setiap anggota mempunyai hak suara yang sama tanpa melihat besar atau kecilnya simpanan yang diberikan kepada KUD Sejahtera Kademangan. Hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan didalam Rapat Anggota meliputi :

1. Laporan dari pengurus yang bertanggung jawab terhadap Rapat Anggota tentang jalannya usaha di dalam koperasi-si dengan melaporkan neraca dan perhitungan laporan keuangan.
 2. Laporan dari Badan Pemeriksa tentang hasil dari evaluasi. Badan Pemeriksa bertanggung jawab terhadap Rapat Anggota.
 3. Pengesahan rencana kerja untuk tahun berikutnya dan peninjauan Anggaran Belanja tahun buku berjalan.
 4. Pemilihan pengurus dan anggota Badan pemeriksa yang baru.
 5. Penetapan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).
- 5.2.2. Pengurus :
- Tugas-tugas dari Pengurus berdasarkan Rapat Anggota selama lima tahun.
- Anggota pengurus yang terpilih akan memegang jabatan Anggota pengurus dipilih dan diangkat melalui Rapat Anggota.
1. Menyusun rencana operasional kerja dan rencana anggaran pendapatan dan biaya.
 2. Realisasi pelaksanaan rencana operasional program kerja.



3. Mengadakan pengawasan dan pengendalian meliputi bidang organisasi, manajemen dan usaha.

Selain daripada tugas-tugas diatas, Pengurus KUD Sejahtera Kademangan juga membina beberapa hubungan-hubungan dengan beberapa instansi pemerintah dan pihak swasta yang diharapkan dapat mengembangkan bidang usaha dari KUD ini. Hubungan-hubungan tersebut antara lain :

1. Dengan Bank BUKOPIN : dalam rangka usaha didalam perdagangan modal.
2. Dengan Perda : bekerja sama dalam hal perizinan usaha pada Waduk Cirata.

3. Dengan PLN : merupakan salah satu unit kerja di KUD Sejahtera Kademangan yang berbentuk kontrak kerja dengan PLN.

Pengurus didalam melaksanakan tugasnya mengangkut seorang manager yang dibantu oleh beberapa orang karyawan lepas. Pada KUD Sejahtera Kademangan ini terdapat empat orang manager yang menangani empat unit kerja, yaitu :

1. Unit kerja pemasaran ikan.
2. Unit kerja pemasaran pakan.
3. Unit kerja listrik.
4. Unit kerja KUT.

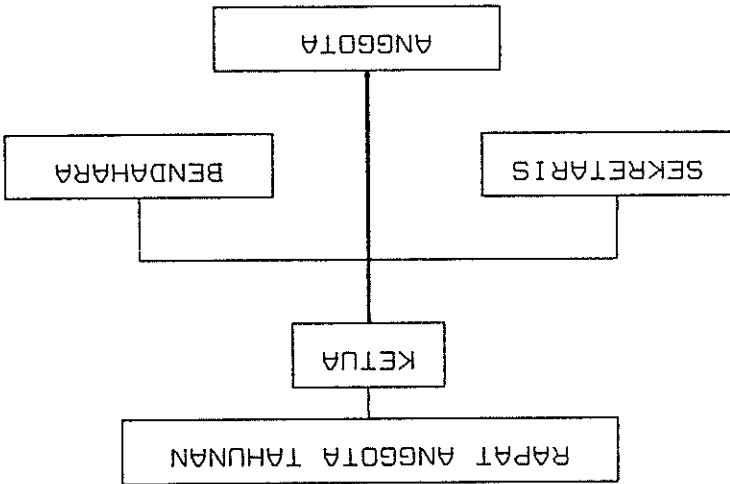
Untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas, Pengurus mangadakan beberapa rapat, antara lain :



5.2.3. Badan Pemeriksa Anggota Badan Pemeriksa dipilih didalam Rapat Anggota dengan satu periode jabatan lima tahun. Adapun syarat-syarat untuk menjadi anggota Badan Pemeriksa adalah calon

Kabupaten Cianjur.

Gambar 6. Struktur Pengurus KUD Sejahtera Kademangan



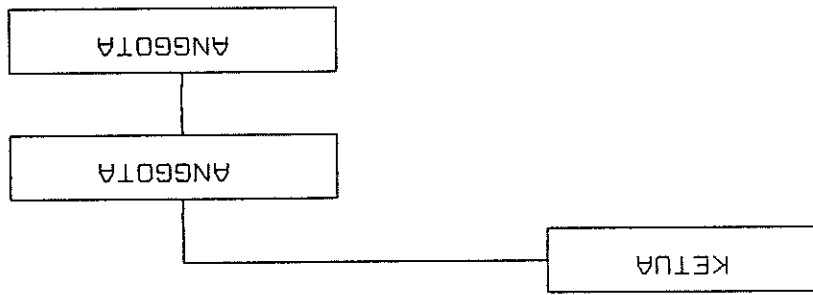
1. Rapat pleno antara Pengurus dengan Badan Pemeriksa.
2. Rapat pembinaan yang dilaksanakan untuk mengadakan pembinaan kepada KUT dan masyarakat.
3. Rapat rutin yang dilaksanakan untuk membahas dan mengevaluasi program kerja dan menentukan kebijaksanaan bulan berikutnya.
4. Rapat insidentil yang dilaksanakan mendadak bila ada masalah yang perlu segera diatasi.

anggota Badan Pemeriksa itu merupakan sesepuh masyarakat dan juga aparat masyarakat yang mempunyai sifat-sifat yang jujur serta mengetahui seluk beluk perkoperasian dan pembukuan.

Tugas-tugas dari Badan Pemeriksa :

1. Memeriksa pembukuan dari koperasi.
2. Memeriksa keuangan koperasi, surat-surat berharga, persediaan dan alat-alat perlengkapan.

Pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa dilaksanakan minimal tiga bulan sekali. Struktur organisasi Badan pemeriksa dapat dilihat pada Gambar 7. dibawah ini.



Gambar 7. Struktur dari Badan Pemeriksa KUD Sejahtera Kabupaten Kabupaten Cianjur.

5.3. Hubungan Antara KUD Sejahtera Kademangan Dengan Bank BUKOPIN¹⁾

Hubungan antara KUD Sejahtera Kademangan dengan Bank Bukopin terbina baik sebelum dan sesudah KUD ini menjadi Hasil wawancara dengan pengurus KUD Sejahtera Kademangan.

nasabah Bank BUKOPIN. Untuk menjadi nasabah Bank BUKOPIN maka KUD ini harus memenuhi prosedur-prosedur yang telah ditetapkan Bank BUKOPIN. Dalam memenuhi prosedur-prosedur tersebut KUD Sejahtera Kademangan memperoleh kemudahan-kemudahan dengan adanya berbagai kebijaksanaan dari Bank BUKOPIN. Hal ini terlihat dalam tahap pengajuan permohonan kredit, dimana salah satu syarat yang diminta adalah data-data mengenai laporan neraca dan rugi laba selama dua tahun. Pada mulanya KUD Sejahtera Kademangan menghadapi kesulitan untuk memenuhi persyaratan tersebut karena KUD ini mengalami kevakuman usaha (1973-1988) sehingga KUD ini tidak mempunyai data-data laporan neraca maupun rugi-laba. Adanya kebijaksanaan dari Bank BUKOPIN, maka pengumpulan informasi dari KUD ini berupa data-data non finansial seperti peninjauan terhadap lokasi usaha, susunan pengurus, sejarah dan perkembangan usaha KUD Sejahtera Kademangan dan lain-lain.

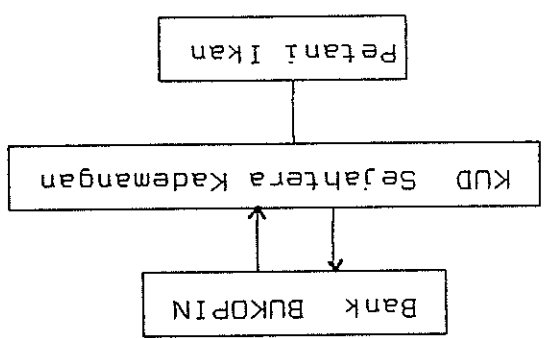
Dalam upaya memperoleh kredit, KUD Sejahtera Kademangan berusaha untuk memenuhi segala syarat yang diajukan oleh Bank BUKOPIN. Jaminan yang diberikan kepada Bank BUKOPIN merupakan jaminan pribadi. Pihak Bank BUKOPIN kemudian mengadakan studi kelayakan terhadap KUD ini untuk meninjau apakah layak KUD ini memperoleh kredit. Setelah Bank BUKOPIN menganggap KUD ini layak, maka permohonan kredit dikabulkan.



Has Cera Pindora, Unsurpungling
1. Diambil sebagai bagian dari silabus yang ada di bagian ini dan disediakan untuk
4. Penelitian yang akan dilakukan, penelitian, penelitian yang akan dilakukan, penelitian yang akan dilakukan, penelitian yang akan dilakukan
5. Penelitian yang akan dilakukan, penelitian yang akan dilakukan, penelitian yang akan dilakukan, penelitian yang akan dilakukan
6. Penelitian yang akan dilakukan, penelitian yang akan dilakukan, penelitian yang akan dilakukan, penelitian yang akan dilakukan

Kredit yang diberikan kepada KUD Sejahtera Kademangan ini merupakan kredit modal kerja. Oleh sebab itu setiap jangka waktu tertentu, Bank BUKOPIN selalu mengadakan peninjauan untuk memonitor perkembangan KUD dalam penggunaan kredit.

Gambar 8. Hubungan antara Bank BUKOPIN dengan KUD Sejahtera Kademangan



Sebagai debitur, KUD Sejahtera Kademangan mempunyai hubungan yang timbal balik dengan Bank BUKOPIN, disatu pihak KUD ini harus tunduk dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan yang dikeluarkan oleh Bank BUKOPIN, dipihak lain dengan adanya kredit yang diberikan kepada KUD maka Bank BUKOPIN dapat melakukan perputaran keuangan sehingga dapat meningkatkan produktivitas usaha.

Setelah menjadi nasabah Bank BUKOPIN, KUD Sejahtera Kademangan adalah debitur dari Bank BUKOPIN. Hubungan antara KUD Sejahtera sebagai debitur dan Bank BUKOPIN sebagai kreditur dapat dilihat pada gambar 8.



Di dalam rangka mengembangkan usahanya, maka KUD Sejahtera Kademangan berusaha untuk meningkatkan pelayanan bagi anggotanya dengan mengadakan TPK-TPK di lokasi-lokasi

yang strategis. Selain itu, KUD Sejahtera Kademangan juga melakukan berbagai kegiatan lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya, seperti mengadakan pelatihan-pelatihan dan berbagai kegiatan lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

5.4.4. Perkembangan Bidang Usaha Koperasi

Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh KUD Sejahtera Kademangan adalah mengadakan pelatihan-pelatihan dan berbagai kegiatan lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengadakan pelatihan-pelatihan dan berbagai kegiatan lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengadakan pelatihan-pelatihan dan berbagai kegiatan lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Di dalam penyelesaian kredit, KUD selalu berusaha tepat waktu. Dengan pertimbangan itu pula maka Bank BUKOPIN dapat memberikan perpanjangan penyelesaian kredit bila kredit KUD ini mendekati jatuh tempo. KUD Sejahtera Kademangan akan mengajukan permohonan perpanjangan sekurang-kurangnya dua bulan sebelum jatuh tempo.

pedesaan sehingga mempermudah anggota yang bertempat tinggal dipedesaan.

Disamping bidang perikanan, KUD Sejahtera Kademangan juga mulai mengarahkan usahanya pada bidang pertanian, khususnya sayur-sayuran. Hal ini dikarenakan adanya potensi pertanian yang bagus serta prospek pemasaran hasil dari pertanian yang cerah. Usaha ini dimulai dengan menarik para petani untuk menjadi anggota KUD Sejahtera Kademangan, sehingga KUD dapat memenuhi kebutuhan para petani tersebut:

5.5. Analisa Finansial KUD Sejahtera Kademangan

Didalam mengevaluasi suatu perkembangan usaha secara teoritis diperlukan data-data mengenai laporan keuangan selama 5-10 tahun. Pada KUD Sejahtera Kademangan ini, data-data laporan keuangan yang didapat adalah laporan neraca dan rugi-laba selama dua tahun. Pada kenyataannya KUD Sejahtera Kademangan ini digunakan sebagai studi kasus dalam penelitian ini. Hal tersebut disebabkan oleh :

1. Pemilihan studi kasus ini ditentukan oleh Bank BUKOPIN yang disesuaikan dengan bidang studi penulis yaitu agribisnis. Hal ini disebabkan KUD Sejahtera Kademangan adalah salah satu dari koperasi yang bergerak di sektor pertanian yang sudah dapat melibatkan hasil usahanya dalam bentuk laporan keuangan. Disamping itu sebagai nasabah Bank BUKOPIN KUD

Sejahtera Kademangan dinilai sebagai nasabah yang baik dan mempunyai prospek usaha yang cerah di masa depan.

2. KUD Sejahtera Kademangan baru dirangku Bank BUKOPIN untuk menjadi nasabahnya, sehingga laporan keuangan yang didapat setelah mendapatkan kredit dari Bank BUKOPIN hanya dua tahun (KUD Sejahtera menjadi debitur Bank BUKOPIN tahun 1988) yaitu laporan neraca dan rugi-laba tahun 1989 dan 1990.
3. Sebelum mendapatkan kredit Bank BUKOPIN, KUD Sejahtera mengalami kevakuman usaha sehingga tidak dapatkan laporan keuangan KUD tersebut sebelum menjadi debitur Bank BUKOPIN.

5.5.1. Analisa Likuiditas

Tujuan dari penggunaan analisa likuiditas adalah untuk mengukur kemampuan dari KUD Sejahtera Kademangan dalam memenuhi hutang jangka pendeknya (hutang lancar) yang harus segera dipenuhi pada saat jatuh tempo. Pengukuran dari analisa ini menggunakan rasio lancar (Current Ratio) yang dihitung berdasarkan laporan neraca selama dua tahun berturut-turut (1989-1990) yang dapat dilihat pada lampiran. Perkembangan likuiditas dari KUD Sejahtera Kademangan dapat dilihat pada Tabel 4.



Halaman 72 dari 72 | *Halaman 72 dari 72*

tahun 1989 dimana nilai rasio lancar sebesar 4.50 dengan
 dung arti setiap satu rupiah hutang lancar dijamin dengan
 4.50 rupiah aktiva lancar. Sebaliknya, pada tahun 1990
 terjadi penurunan nilai rasio dimana pada tahun tersebut
 rasio yang dicapai adalah sebesar 2,41. Keadaan ini ter-
 jadi dikarenakan pada tahun 1989 KUD baru memulai mengka-
 tifikan kembali kegiatan usahanya, dimana hutang jangka
 pendek yang harus dipenuhi hanya hutang bank saja. Se-
 dangkan pada tahun 1990 dimana kegiatan usaha sudah berja-
 lan, peningkatan hutang lancar lebih besar peningkatan ak-
 tiva lancarnya sehingga likuiditas tahun ini berkurang.
 (lihat Tabel lampiran 1. dan Tabel lampiran 2).

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan KUD Sejahtera
 Kademangan.

Tahun	Rasio Likuiditas
1989	4.50
1990	2.41
Rata-rata	3.46

Tabel 4. Pengukuran Nilai Likuiditas KUD Sejahtera
 Kademangan Tahun 1989-1990

Rasio Lancar (Current Ratio). Hasil perhitungan
 dari perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lan-
 car memperlihatkan bahwa keadaan rasio lancar dari KUD
 ini bertukarasi selama dua tahun. Hal ini terlihat pada

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan KUD Sejahtera Kademangan.

Tahun	Rata-rata
1989	1.02
1990	1.02
	1.02

Tabel 5. Perkembangan Tingkat Solvabilitas KUD Sejahtera Kademangan Tahun 1989-1990

Pada analisa ini tujuan yang ingin dicapai adalah pengukuran terhadap kemampuan perusahaan dalam memenuhi hutang baik jangka pendek maupun jangka panjang pada saat perusahaan dilikuidasikan. Analisa ini mempunyai arti yang penting bagi kreditur jangka panjang atau para pemegang saham, sebab seperti diketahui bahwa kondisi keuangan jangka pendek saja belum dapat menjamin kondisi keuangan dalam jangka panjang. Pengukuran solvabilitas ini berdasarkan laporan neraca dua tahun berturut-turut (1989-1990) yang dapat dilihat pada lampiran. Berikut ini disajikan perkembangan solvabilitas KUD Sejahtera Kademangan dengan menggunakan Net Capital Ratio pada Tabel 5.

5.5.2. Analisa Solvabilitas

dilihat secara keseluruhan rata-rata nilai dari rasio lancar ini yaitu sebesar 3,46 berada diatas standar umum yang dianggap cukup baik (2.00).

yang dicapai oleh KUD Sejahtera kademangan adalah 0.00. Hal ini terjadi karena pada tahun pertama KUD ini menjadi debitur Bank BUKOPIN, KUD Sejahtera kademangan belum menerima laba bersih yang berasal dari hasil usahanya. Hal itu dikarenakan investasi yang dilakukan belum mencapai titik impas sehingga belum dapat menghasilkan laba bersih. Sedangkan pada tahun 1990 nilai Return On Net Worth dari KUD meningkat menjadi 0.66 (66 persen) yang mengandung arti setiap rupiah kekayaan bersih menghasilakan keuntungan bersih sebesar 66 persen. Nilai tersebut sangat baik sebab berada diatas dari nilai Return On Net Worth dari industri yaitu sebesar 21,6 persen. Nilai rata-rata Return On Net Worth yang dicapai KUD Sejahtera kademangan cukup baik yaitu sebesar 0,33 (33 persen) karena berada diatas Return On Net Worth industri 21,6 persen.



VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

1. Kredit Bank BUKOPIN lebih banyak disalurkan kepada koperasi non pertanian dan baru mulai merangkul koperasi pertanian untuk menjadi nasabahnya (1986).

2. Dengan semakin meningkatnya penyaluran kredit Bank BUKOPIN kepada koperasi (Tabel 1.) dan dengan mulai menyalurkan kreditnya kepada koperasi pertanian menunjukkan bahwa Bank BUKOPIN dapat melaksanakan perannya dengan baik sebagai lembaga penyalur kredit bagi pengembangan koperasi. Salah satu debitur Bank BUKOPIN yang bergerak disektor pertanian adalah KUD Sejahtera Kademangan yang merupakan KUD perikanan jaring terapung, yang dalam penelitian ini dipakai sebagai tempat studi kasus untuk mengevaluasi Bank BUKOPIN di dalam perannya sebagai penyalur kredit dan pemberi bimbingan serta pembinaan kepada nasabahnya.
3. Dengan adanya kebijaksanaan Bank BUKOPIN yang meringankan prosedur kredit maka penyelesaian prosedur Bank BUKOPIN dapat dilaksanakan dengan lancar dan cepat oleh koperasi yang ingin menjadi nasabah Bank BUKOPIN menunjukkan bahwa penetapan prosedur Bank BUKOPIN tidak memberikan koperasi-koperasi



calon nasabah Bank BUKOPIN. Dalam penelitian ini KUD Sejahtera Kademangan sebagai salah satu debitur bank BUKOPIN tidak menemukan kesulitan didalam memenuhi prosedur yang ditetapkan Bank BUKOPIN.

4. Partisipasi koperasi sebagai sumber dana bagi Bank BUKOPIN dan realisasi kredit Bank BUKOPIN meningkat selama tiga tahun berturut-turut (lihat Tabel 2.). Sedangkan pembinaan Bank BUKOPIN kepada koperasi nasabah dilaksanakan mulai dari taraf perencanaan hingga pengembalian kredit, diharapkan dari usaha pembinaan tersebut koperasi dapat memanfaatkan kredit Bank BUKOPIN sebaik-baiknya.

5. Sebagai bank swasta nasional Bank BUKOPIN berhasil menjalankan tugasnya baik sebagai bank komersial maupun sebagai bank koperasi. Hal ini terlihat dari peringkat yang dicapai oleh Bank BUKOPIN diantara 32 buah bank-bank swasta lainnya yang tergolong dalam bank terbesar dan tersehat.

6. Adanya bantuan kredit dari Bank BUKOPIN meningkatkan kemampuan KUD Sejahtera Kademangan dalam mengembangkan usahanya. Hal ini terlihat pada hasil dari penilaian likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas yang menunjukkan hasil yang cukup baik sete-

lah KUD Sejahtera Kademangan menjadi debitur dari Bank BUKOPIN.

Tingkat likuiditas KUD Sejahtera Kademangan setelah mendapat pinjaman dari Bank BUKOPIN menunjukkan nilai yang baik. Dengan adanya kredit tersebut maka kemampuan KUD Sejahtera Kademangan dalam memenuhi kewajiban atas hutang jangka pendek meningkat. (Tabel 4.)

Pada tingkat solabilitas, KUD Sejahtera Kademangan meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi kewajiban atas hutang jangka pendek maupun jangka panjang setelah mendapat kredit dari Bank BUKOPIN. (Tabel 5.)

Pada tingkat profitabilitas KUD ini juga menunjukkan peningkatan yang mengembirakan sehingga adanya bank-tuan kredit tersebut mamperlancar usaha dan menghasilkan laba yang meningkat. (Tabel 6.)

Berdasarkan penilaian kualitatif dari Bank BUKOPIN prospek usaha dari KUD Sejahtera Kademangan ini cukup cerah.

6.2. Saran

1. Penyaluran kredit Bank BUKOPIN terhadap bidang usaha koperasi yang bergerak di sektor pertanian hendaknya pada masa-masa yang akan datang lebih ditingkatkan. Hal ini disebabkan kredit kepada koperasi pertanian masih relatif kecil bila dibandingkan dengan koperasi si non pertanian.





2. Sebaiknya KUD mencoba untuk mengembangkan usahanya sehingga KUD Sejahtera Kademangan yang berklasifikasi A dapat menjadi satu KUD mandiri. Hal ini bertujuan agar KUD ini tidak hanya menjadi debitur dari Bank BUKOPIN saja, tetapi berkembang menjadi anggota dari Bank BUKOPIN. Salah satu syarat menjadi anggota Bank BUKOPIN adalah KUD tersebut haruslah sebuah KUD Mandiri.
3. Untuk tahun-tahun mendatang, diharapkan KUD Sejahtera Kademangan dapat lebih merapikan sistem manajemen dan organisasinya guna menunjang kemajuan usahanya.
4. Dalam menganalisa laporan keuangannya, KUD Sejahtera Kademangan diharapkan pada tahun-tahun mendatang sudah dapat membuat standarisasi bagi nilai hasil usahanya.

Hak Cipta: Pribadi/Instansi/Umum/Undang
1. Dilindungi sebagai bagian dari kekayaan intelektual yang harus dipertahankan dan dipertanggungjawabkan
2. Diperoleh dengan izin dari IPB University
3. Diperoleh dengan izin dari IPB University
4. Diperoleh dengan izin dari IPB University
5. Diperoleh dengan izin dari IPB University
6. Diperoleh dengan izin dari IPB University
7. Diperoleh dengan izin dari IPB University
8. Diperoleh dengan izin dari IPB University
9. Diperoleh dengan izin dari IPB University
10. Diperoleh dengan izin dari IPB University

DAFTAR PUSTAKA

- Al Jufry, Asri. 1991. *Problema Seribu Jerat*. Infobank, Vol I XIV, Juli 1991, 16-17.
- Anwar, Ahmad, Drs. dan Prato, Mulyo. 1978. *Bagaimana Memanfaatkan Fasilitas KMKP Untuk Memajukan Usaha Anda*. Balai Aksara. Jakarta.
- , 1978. *Kredit Kelayakan Pasti Membantu Usaha Anda*. Balai Aksara. Jakarta.
- Bambang Riyanto, Drs. 1989. *Dasar-Dasar Pembelian Perusahaan*. Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Bank BUKOPIN. 1990. *Laporan Hasil Pengelolaan Bank BUKOPIN*. Jakarta.
- Hartanto, D. 1981. *Akuntansi Untuk Usahawan*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 1984. *Prinsip-Prinsip Akuntansi Indonesia 1984*. IAI. Jakarta.
- Kadarsan, H.W. 1985. *Keuangan dan Pembinaan Perusahaan Pertanian*. Jurusan Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Kopindo. 1986. *Tanya Jawab Koperasi : Mengenal Dasar-Dasar Berkoperasi*. Koperasi Pemuda Indonesia. Jakarta
- Kusumah, E. 1986. *Himpunan Bacaan Penyerta Kuliah Mata Ajaran Koperasi*. Jurusan Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- , 1982. *Management Koperasi*. Jurusan Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- , 1990. *Laporan Hasil Pemeriksaan an KUD Sejahtera Kadewangan*. Cianjur.
- Malik, R. dkk. 1988. *Dasar-Dasar Praktek Dan Kegiatan Usaha Bank*. Yayasan Pembinaan Keluarga UPN. Yogyakarta.

- Majalah Swasembada. 1990. Bank Terbesar Dan Tersehat. Yayasan Swasembada Swakarya. Jakarta.
- S, Munawir. 1983. Analisa Laporan Keuangan. Liberty. Yogyakarta.
- Sinungan, M. 1978. Kredit Seluk Beluk dan Teknik Pengelolaan. Penerbit Yagrat. Jakarta.
- Suad Husnan, Drs. 1982. Dasar-Dasar Manajemen Keuangan (Pembelajaran Perusahaan). Liberty. Yogyakarta.
- Weston, J. Fred dan Eugene, F. Brigham. 1988. Manajemen Keuangan, Edisi ke tujuh, Jilid I. Penerbit Erlangga. Jakarta.





Hak Cipta Hibridologi Unarang-urandang

1. Diizinkan mengutip sebagian atau seluruh karya kami for keperluan pendidikan dan penelitian sumber :
- a. Pengutipan harus menyebutkan sumbernya, identitas, pembuatan karya ilmiah, jenis-jenis laporan, jenis-jenis karya atau tulisan atau masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengkomersialkan dan menyalahgunakan sebagian atau seluruh karya kami for tujuan apapun apapun tanpa izin IPB University.

L A M P I R A N

Tabel Lampiran 1. Neraca KUD Sejahtera Kaduwangsa Per 31 Desember 1989

A K T I V A		P E R K I R A N	
HUTANG DAN KEAYAAN		J U M L A H	
AKTIVA LANCAR			
Kas	Rp. 1,529,638.00		
Bank	Rp. 100,000.00		
Hutang Usaha Angg.	Rp. 14,391,575.00		
Hutang Usaha Non Anggota	Rp. --		
Hutang Usaha yang ditanggung	Rp. --		
Hutang lain-lain	Rp. 46,422,000.00		
Penyusutan piutang	Rp. --		
Penyusutan piutang	Rp. --		
Penyusutan piutang	Rp. --		
Penyusutan piutang	Rp. --		
Total Aktiva Lancar	Rp. 62,543,213.00		
INVESTASI JK. PANJANG			
Stapakan di Puskud	Rp. 306,878.00		
Stapakan di KPI	Rp. --		
Total Investasi Jk. Panjang	Rp. 306,878.00		
HUTANG JK. PANJANG			
Hutang non anggota	Rp. 24,259,000.00		
Hutang bank	Rp. 60,000,000.00		
Total Hutang Jangka Panjang	Rp. 84,259,000.00		
AKTIVA TETAP			
KEKAYAAN BERSIH			
Bangunan	Rp. 20,758,000.00		
Mesin-mesin	Rp. 235,000.00		
Kendaraan	Rp. --		
Peralatan Kantor	Rp. 1,035,500.00		
Nilai Perolehan	Rp. 22,238,500.00		
AKUMULASI Penyusutan	Rp. --		
Total Aktiva Tetap	Rp. 22,238,500.00		
AKTIVA LAIN-LAIN	Rp. 14,851,359.00		
Total Aktiva	Rp. 99,939,950.00		
KEAYAAN BERSIH			
Total Hutang Dan KE-IPB	Rp. 99,939,950.00		

Halaman 1 dari 1 halaman
 1. Diambil sebagai bagian dari laporan keuangan dan merupakan sumber
 2. Perhitungan yang dilakukan berdasarkan standar, prosedur, peraturan yang berlaku, kebijakan laporan, prosedur kerja yang digunakan untuk prosedur
 3. Pengukuran nilai aset yang dilakukan berdasarkan nilai wajar IPB University
 4. Diambil sebagai sumber dari neraca KUD Sejahtera Kaduwangsa Per 31 Desember 1989

Label lampiran 3. Laporan Rugi-Laba KUD Sejahtera Kedewangan Per 31 Desember 1989

K E T E R A N G A N	ANGGOTA	NON ANGGOTA	JUMLAH
1. PENJUALAN/PENDAPATAN :			
- Penjualan barang	Rp. 125,250,035.00	Rp. 23,450,525.00	Rp. 148,700,560.00
- Penjualan jasa	Rp. 5,396,075.00	Rp. 1,750,325.00	Rp. 7,146,400.00
Total Penjualan	Rp. 130,646,130.00	Rp. 25,200,850.00	Rp. 155,846,980.00
12. HARGA POKOK PENJUALAN :			
- Persediaan awal	Rp. --	Rp. --	Rp. --
- Pembelian jasa	Rp. 120,360,000.00	Rp. 20,000,000.00	Rp. 140,360,000.00
Barang siap di jual	Rp. 120,360,000.00	Rp. 20,000,000.00	Rp. 140,360,000.00
- Persediaan akhir	Rp. --	Rp. --	Rp. --
Harga Pokok Penjualan	Rp. 120,360,000.00	Rp. 20,000,000.00	Rp. 140,360,000.00
Hasil Usaha Bruto	Rp. 10,286,130.00	Rp. 5,200,850.00	Rp. 15,486,980.00
13. BEBAN USAHA :			
- Biaya usaha	Rp. 7,500,000.00	Rp. 3,760,025.00	Rp. 11,260,025.00
- Biaya umum	Rp. 2,786,130.00	Rp. 1,440,825.00	Rp. 4,226,955.00
Hasil usaha sebelum pen-	Rp. --	Rp. --	Rp. --
dapatan/biaya lain-lain			
14. PENDAPATAN/BIAYA LAIN- LAIN :			
- Pendapatan lain-lain	Rp. --	Rp. --	Rp. --
- Biaya lain-lain	Rp. --	Rp. --	Rp. --
Total pendapatan/biaya lain-lain	Rp. --	Rp. --	Rp. --
HASIL USAHA SEBELUM PPH	Rp. --	Rp. --	Rp. --
PPH	Rp. --	Rp. --	Rp. --
HASIL USAHA SESUDAH PPH	Rp. --	Rp. --	Rp. --

Hal Cipta: Penerbitan: Unsur-unsur yang

IPB University



Hal Cipta: Penerbitan: Unsur-unsur yang
 1. Ditinjau mengenai sebagian atau seluruh karya-karya yang terdapat dalam dokumen dan dipersepsi sebagai:
 a. Pergerakan hasil dari aktivitas kreatifitas intelektual, seni, literasi, penerbitan karya ilmiah, pengetahuan, pengalaman, pendidikan, karya atau tingkah laku manusia
 b. Yang tidak terdapat dalam lingkup pengetahuan yang wajar IPB University
 c. Ditinjau mengenai isi dan bentuknya sebagai karya-karya yang terdapat dalam dokumen dan dipersepsi sebagai:
 1. Ditinjau mengenai isi dan bentuknya sebagai karya-karya yang terdapat dalam dokumen dan dipersepsi sebagai:
 1. Ditinjau mengenai isi dan bentuknya sebagai karya-karya yang terdapat dalam dokumen dan dipersepsi sebagai:

Tabel Lampiran 5. Perhitungan Dari Analisa Finansial KUD Sejatera Kademangan tahun 1989-1990

	R A S I O		KUD SEJATERA KADEMANGAN	
	1989	1990	RATA-RATA	
1. Analisa Likuiditas				
- Rasio Lancar / Current Ratio :				
Total Aktiva Lancar	62,543,213.00	163,929,652.30	114.5 + 2.41	
Total Hutang Lancar	13,898,575.00	68,137,667.49	2.41	
				2
12. Analisa Solabilitas				
- Net Capital Ratio :				
Total Aktiva	99,939,950.00	216,925,838.30	11.02+1.02	
Total Hutang	98,155,575.00	212,396,667.49	1.02	
				2
13. Analisa Profitabilitas				
- Return On Net Worth :				
Labanya Bersih	--	2,980,795.90	10 + 0.66	
Kekayaan Bersih	1,784,375.00	4,529,170.90	0.66	
				2
				0.33 =

Halaman 11 dari 11

1. Ditinjau sebagai bagian dari seluruh karya tulis yang bersangkutan dan diproses dengan...

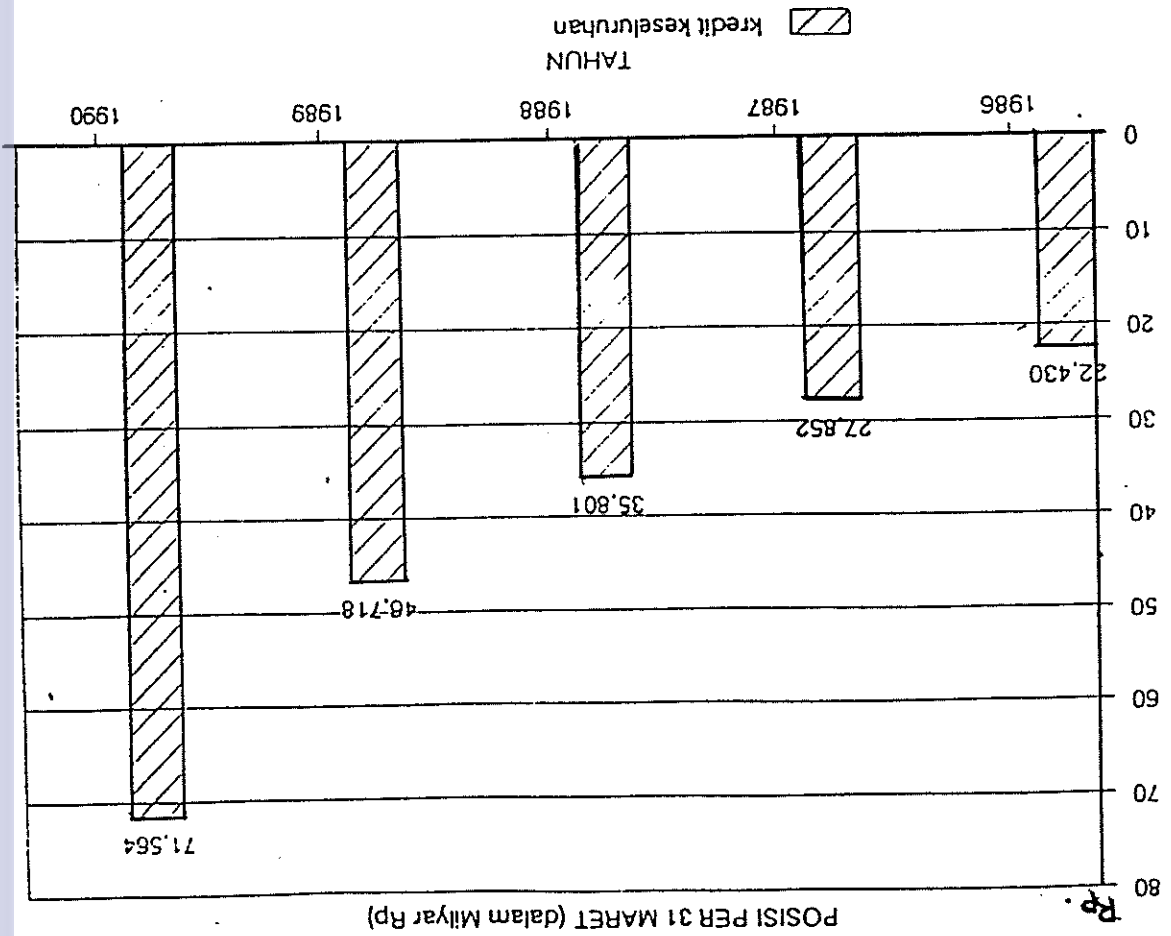
2. Perhitungan ini adalah untuk keperluan akademik dan penelitian, dan tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial.

3. Perhitungan ini adalah untuk keperluan akademik dan penelitian, dan tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial.

4. Perhitungan ini adalah untuk keperluan akademik dan penelitian, dan tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial.

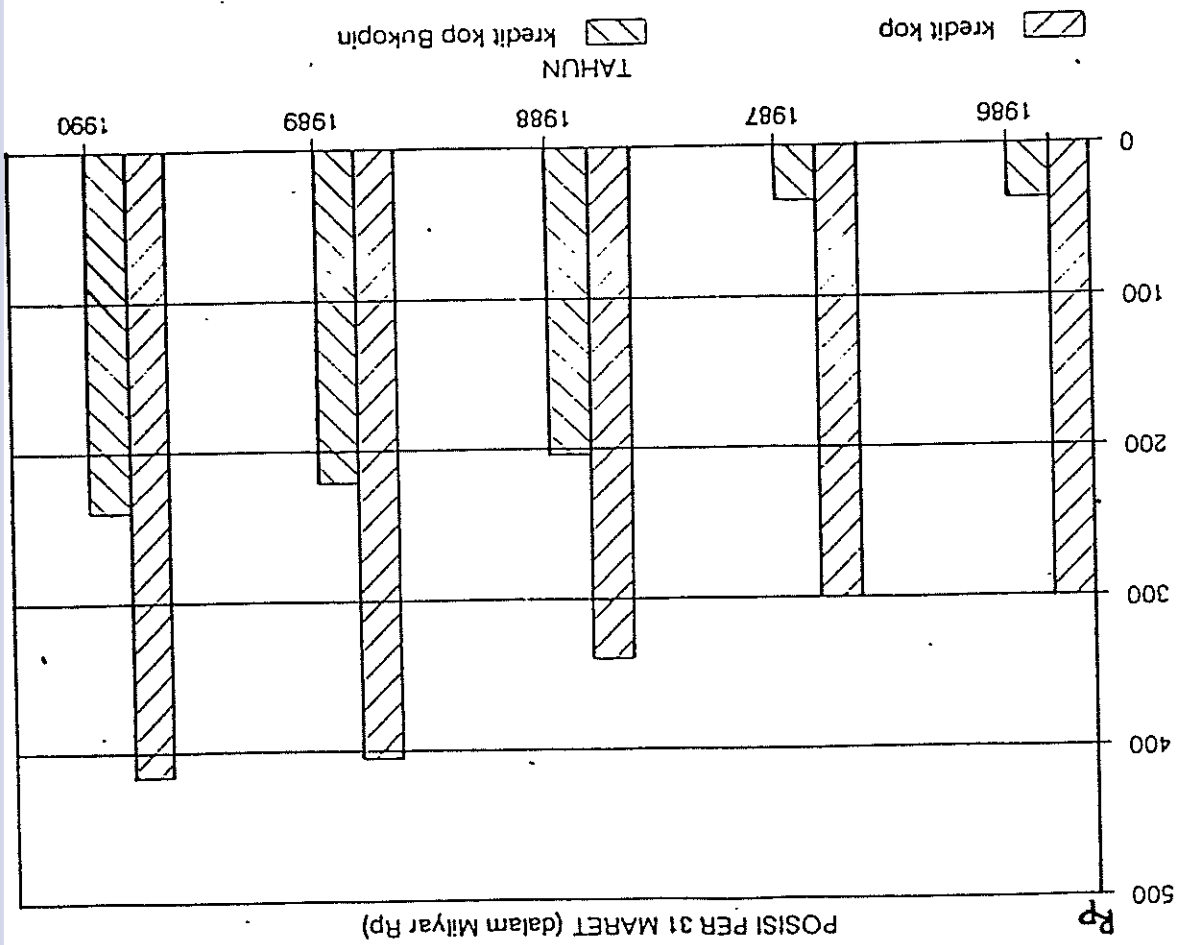
Halaman 1 dari 1
 1. Diketahui sebagai berikut: data sebagai berikut ini merupakan data yang diperoleh dari perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan. Perusahaan tersebut memiliki beberapa jenis produk keuangan yang ditawarkan kepada masyarakat. Perusahaan tersebut memiliki beberapa jenis produk keuangan yang ditawarkan kepada masyarakat. Perusahaan tersebut memiliki beberapa jenis produk keuangan yang ditawarkan kepada masyarakat.

Gambar Lampiran 1. Penyaluran Kredit Perbankan (Posisi Per 31 Maret)



PENYALURAN KREDIT PERBANKAN

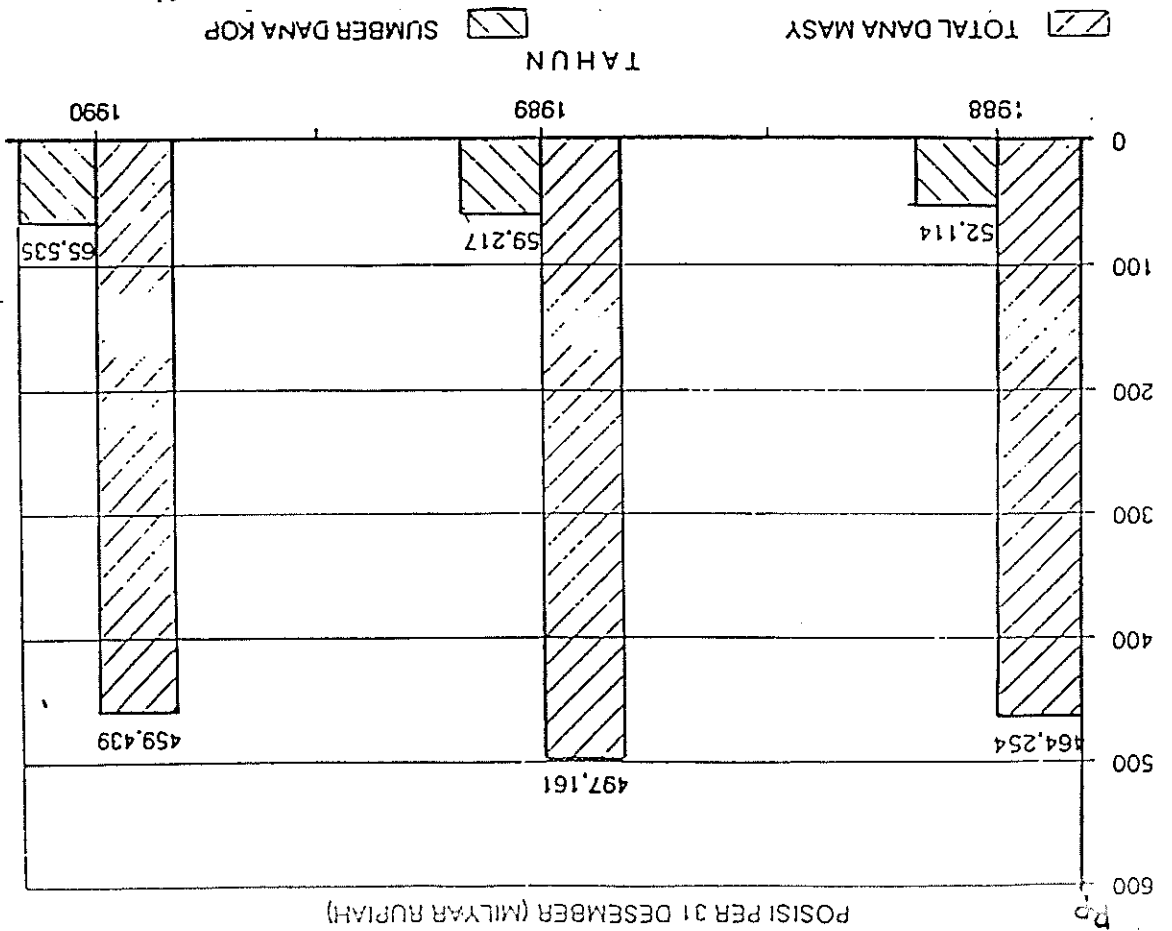
Gambar Lampiran 2. Penyaluran Kredit Koperasi (Posisi Per 31 Maret)



PENYALURAN KREDIT KOPERASI

Halaman ini merupakan bagian dari laporan tahunan yang akan diterbitkan oleh Institut Pertanian Bogor dan dipublikasikan secara resmi. Apabila terdapat kesalahan atau ketidakakuratan dalam data atau informasi yang disajikan, kami mohon maaf dan akan segera melakukan perbaikan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini. IPB University.

Gambar Lampiran 3. Perkembangan Sumber Dana Bank BUKOPIN (Posisi Per 31 Desember)



PERKEMBANGAN SUMBER DANA BANK BUKOPIN